

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM
DI BANJARMASIN

2017.



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin tahun 2017 ini dapat disusun dengan baik.

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mengamanatkan semua instansi pemerintah wajib menyiapkan dan menyampaikan LAKIP sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh.

Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyajian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.21.04.15.2163 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja ini adalah mewujudkan akuntabilitas BBPOM di Banjarmasin kepada Kepala Badan POM RI. Disamping itu, melalui pelaporan ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk memberikan informasi tentang apa yang telah dicapai oleh BBPOM di Banjarmasin dan bagaimana proses pencapaiannya.

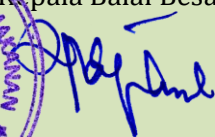
Fungsi utama Laporan Kinerja adalah : pertama, merupakan sarana bagi BBPOM di Banjarmasin untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada Kepala Badan POM dan seluruh stakeholder (Instansi Pemerintah Pusat/Daerah dan masyarakat), dan kedua, merupakan sarana untuk melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja BBPOM di Banjarmasin untuk memperbaiki/meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Tahun 2017 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) BBPOM di Banjarmasin periode tahun 2015-2019. Oleh karena itu pencapaian sasaran melalui pelaksanaan program/kegiatan tahun 2017 diharapkan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran tahun-tahun selanjutnya.

Akhirnya kami mengucapkan semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat bagi BBPOM di Banjarmasin dan Badan POM selaku induk organisasi.



Banjarmasin, 7 Februari 2018
Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin


Drs. Sapari, Apt., M.Kes
NIP. 19590815 199303 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

BBPOM di Banjarmasin sebagai salah satu instansi pemerintah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai bentuk pertanggungjawaban prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Laporan akuntabilitas kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada Kepala Badan POM dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja BBPOM di Banjarmasin dan upaya memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Pada Restra BBPOM di Banjarmasin yang disusun dengan mengacu pada Renstra Badan POM tahun 2015 - 2019, ditetapkan tujuan yang ingin dicapai, yaitu : 1) Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatnya kesehatan masyarakat dan 2) Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi. Untuk mencapai tujuan, telah ditetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis, yaitu : (1) Sasaran Strategis “Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan”; (2) Sasaran Strategis “Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Masyarakat”; dan (3) Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan Badan POM”

Capaian Kinerja BBPOM di Banjarmasin tahun 2017 adalah sebagai berikut :

A. Sasaran Strategis 1 - “Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan”

Indikator kinerja dan pencapaian dari sasaran ini adalah :

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat :

Target 93,00% dan realisasi 97,46%, sehingga pencapaian kinerja adalah 104,80%

2. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat :

Target 62,00% dan realisasi 80,42%, sehingga pencapaian kinerja adalah 129,70%

3. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat :

Target 91,00% dan realisasi 94,43%, sehingga pencapaian kinerja adalah 103,77%

4. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat :

Target 81,00% dan realisasi 100%, sehingga pencapaian kinerja adalah 123,46%

5. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat :

Target 76,00% dan realisasi 92,08%, sehingga pencapaian kinerja adalah 121,16%

Untuk mencapai sasaran ini dilakukan program/kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan dan capaiannya sebagai berikut :

- a) Jumlah Sampel Obat KB yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis 100%;
- b) Jumlah Sampel Obat yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis 100,05%;
- c) Jumlah Sampel Makanan yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis 100%;
- d) Pemenuhan Target Sampling Produk Obat di Sektor Publik (IFK) 100,00%;
- e) Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan 106,90%;
- f) Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan 110,16% dan
- g) Jumlah Perkara di Bidang Obat dan Makanan 122,22%.

B. Sasaran Strategis 2 - “Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Masyarakat”.

Indikator kinerja dan capaiannya adalah : (1) Tingkat Kepuasan Masyarakat (100,28%); dan (2) Jumlah Kab/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan (100%).

Untuk mewujudkan sasaran strategis ini dilakukan melalui peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi. Adapun indikator kegiatan dan capaiannya adalah sebagai berikut : a) Jumlah layanan publik (119,90%) dan b) Jumlah Komunitas yang diberdayakan (di luar pengawalan PJAS, FSMD, dan Pasar Aman) sebesar 100%.

C. Sasaran Strategis 3 - “Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM”

Indikator kinerja dari sasaran strategis ini adalah Nilai SAKIP dari Badan POM. Pada tahun 2017 ditargetkan mendapat nilai 81(A) dan realisasi nilai 72,26(BB), sehingga pencapaian kinerja adalah 89,21%.

Untuk mencapai sasaran strategis ini, dilakukan kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan dan capaiannya sebagai berikut : a) Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar (69,30%) dan b) Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu (100%).

Dari ketiga sasaran strategis tersebut di atas, yang belum tercapai dengan baik adalah Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM” Hal ini disebabkan karena SAKIP BBPOM di Banjarmasin baru bisa mendapat nilai BB, sementara target adalah nilai A. Oleh karena itu BBPOM di Banjarmasin harus melakukan berbagai upaya peningkatan kinerja, antara lain :

- a) Pengawasan yang lebih ke hulu dan terintegrasi.
- b) Mengedepankan tindakan pencegahan melalui bimbingan tepat guna kepada pelaku usaha sehingga mampu dan mandiri dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan yang diproduksi dan atau diedarkan.
- c) Pemberdayaan masyarakat agar dapat melindungi diri dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan
- d) Memperkuat kemitraan dengan *stakeholders* agar bersinergi dalam mewujudkan keamanan Obat dan Makanan.
- e) Pelaksanaan *monev* secara seksama terhadap pelaksanaan dan pencapaian kegiatan agar bisa mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan, melalui DIPA BBPOM di Banjarmasin Tahun Anggaran (TA) 2017, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 24.087.824.000,-. Realisasi penggunaan anggaran BBPOM di Banjarmasin pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 22.553.101.932,- atau 93,63%.

Hasil pengukuran tingkat efisiensi, menunjukkan bahwa BBPOM di Banjarmasin dapat melaksanakan kegiatan secara efisien. Kegiatan yang paling tinggi tingkat efisiennya adalah kegiatan pada output Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan dengan tingkat efisiensi sebesar 0,55%.

Bila dibandingkan antara serapan anggaran dan capaian kinerja/kegiatan yang umumnya dapat terealisasi dengan baik bahkan ada yang melebihi target, BBPOM di Banjarmasin perlu melakukan evaluasi terhadap pengalokasian anggaran untuk masing-masing kegiatan. Pengalokasian anggaran pada masing-masing kegiatan akan lebih disesuaikan lagi dengan kebutuhan ril, sehingga tersedia anggaran yang dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya.

Kegiatan yang masih perlu penambahan alokasi anggaran adalah kegiatan yang terkait dengan penyediaan sarana prasana yang sesuai standar. Hal ini perlu dilakukan karena sampai pada akhir tahun 2017, ketersediaan sarana dan prasarana yang sesuai standar baru mencapai 69,30%.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Ringkasan Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel, Gambar dan Lampiran.....	vi
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Gambaran Umum Organisasi.....	1
1.2 Struktur Organisasi BBPOM di Banjarmasin.....	2
1.3 Aspek Strategis Organisasi.....	6
1.4 Analisis Lingkungan Strategis.....	6
1.5 Isu Strategis.....	10
BAB II Perencanaan Kinerja	14
2.1 Rencana Strategis.....	14
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2017.....	17
2.3 Kriteria Pencapaian Indikator Sasaran.....	19
BAB III Akuntabilitas Kinerja	20
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	20
3.2 Analisis Efisiensi Kegiatan.....	58
3.3 Realisasi Anggaran.....	59
BAB IV Penutup	60
4.1 Kesimpulan.....	60
4.2 Saran.....	61

DAFTAR TABEL, GAMBAR DAN LAMPIRAN

1. Daftar Tabel

Halaman

Tabel 1.	Sasaran Pengawasan di Provinsi Kalimantan Selatan	9
Tabel 2.	Perjanjian Kinerja BBPOM di Banjarmasin Tahun 2017	18
Tabel 3.	Kriteria Penilaian Terhadap Pencapaian Indikator	19
Tabel 4.	Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2016.....	20
Tabel 5.	Capaian Indikator Kinerja Utama BBPOM di Banjarmasin	22
Tabel 6	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama BBPOM di Banjarmasin dengan BBPOM di Mataram.....	22
Tabel 7.	Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 1 BBPOM di Banjarmasin	23
Tabel 8.	Rincian Hasil Uji Pangan Berdasarkan Nomor Registrasi.....	34
Tabel 9.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategi 1 BBPOM di Banjarmasin	37
Tabel 10.	Rincian Sarana Produksi Yang Diperiksa	41
Tabel 11.	Rincian Sarana Distribusi yang Diperiksa.....	43
Tabel 12.	Kasus Pelanggaran Bidang Obat dan Makanan Tahun 2017	44
Tabel 13.	Perkiraan Nilai Ekonomi Produk yang Disita sebagai Barang Bukti	45
Tabel 14	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 BBPOM di Banjarmasin.....	48
Tabel 15.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 BBPOM di Banjarmasin....	54
Tabel 16.	Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2017	59

2. Daftar Gambar

Gambar 1.	Struktur Organisasi BBPOM di Banjarmasin	3
Gambar 2.	Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan	7
Gambar 3.	Jumlah Pegawai Menurut Unit Kerja	7
Gambar 4.	Grafik Sebaran Sarana Produksi dan Distribusi/Pelayanan	9
Gambar 5.	Grafik Sebaran Sarana Produksi dan Distribusi/Pelayanan	10
Gambar 6.	Grafik Pencapaian Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	24
Gambar 7.	Grafik Perbandingan Realisasi Obat Yang Memenuhi Syarat BBPOM di Banjarmasin ...	24
Gambar 8.	Grafik Capaian Indikator Persentase Obat tradisional yang MS.....	27

Gambar 9. Grafik Perbandingan Realisasi Obat Tradisional Yang Memenuhi Syarat BBPOM di Banjarmasin	29
Gambar 10. Grafik Pencapaian Indikator Persentase Kosmetik yang MS.....	29
Gambar 11. Grafik Perbandingan Realisasi Kosmetik Yang Memenuhi Syarat BBPOM di Banjarmasin	30
Gambar 12. Grafik Perbandingan Realisasi Suplemen Kesehatan Yang Memenuhi Syarat BBPOM di Banjarmasin	32
Gambar 13 Grafik Pencapaian Indikator Persentase Makanan yang MS.....	33
Gambar 14. Grafik Perbandingan Realisasi Makanan Yang Memenuhi Syarat BBPOM di Banjarmasin	34
Gambar 15. Grafik Perbandingan Realisasi Sampel Dengan Parameter Kritis Yang Diuji BBPOM di Banjarmasin	38
Gambar 16. Grafik Perbandingan Realisasi Sarana Produksi Yang Diawasi BBPOM di Banjarmasin	41
Gambar 17. Grafik Perbandingan Realisasi Sarana Distribusi Yang Diawasi BBPOM di Banjarmasin	43
Gambar 18. Pengawasan distribusi makanan di Giant Mall	43
Gambar 19. Penghargaan dari Kepala Badan POM terkait tindak pidana di bidang pemberantasan obat tanpa ijin edar dan kadaluarsa	49
Gambar 20. Barang bukti obat penyalahgunaan obat di Kalimantan Selatan dan Peninjauan Barang Bukti Oleh Kepala Badan POM dan Kapolda Kalsel	49
Gambar 21. Penghargaan Stand Terbaik Untuk BBPOM Banjarmasin Pada Kalsel Expo 2017	50
Gambar 22. Kegiatan penyuluhan atau Bimtek Komunitas Desa.....	53
3. Daftar Lampiran	
Lampiran 1. Formulir Renstra BBPOM di Banjarmasin.....	62
Lampiran2. Perjanjian Kinerja BBPOM di Banjarmasin 2017.....	64
Lampiran3. Penetapan Indikator Kinerja Utama BBPOM di Banjarmasin 2017	67
Lampiran4. Perencanaan dan Realisasi per Triwulan Kegiatan Tahun 2017	70
Lampiran5. Pengukuran Kinerja Kegiatan BBPOM di Banjarmasin Tahun 2017	72
Lampiran 6. Pengukuran Tingkat Efisiensi Kegiatan	76
Lampiran 7.Perjanjian Kinerja BBPOM di Banjarmasin Tahun 2018	78
Lampiran 8. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2018	82
Lampiran 9. Daftar Peralatan Laboratorium Tahun 2017	85

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap K/L diwajibkan melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi, serta menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) pada setiap akhir tahun kepada Presiden melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Maksud penyusunan Lakip Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin tahun 2017 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) atas pelaksanaan program/ kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Adapun tujuan penyusunan Lakip adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran BBPOM di Banjarmasin selama tahun 2017. Evaluasi yang dilakukan dirumuskan menjadi suatu simpulan yang dapat dijadikan sebagai masukan dan referensi pada penetapan kebijakan dan strategi tahun berikutnya.

1.1 Gambaran Umum Organisasi

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya melalui Peraturan Kepala Badan POM nomor 14 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM, kedudukan, tugas pokok dan fungsi **Balai Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin** adalah sebagai berikut :

Kedudukan

- a) BBPOM di Banjarmasin adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM
- b) BBPOM berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
- c) Dalam melaksanakan tugasnya secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama

d) BBPOM di Banjarmasin dipimpin oleh seorang Kepala

Tugas Pokok

BBPOM di Banjarmasin mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapeutic, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya.

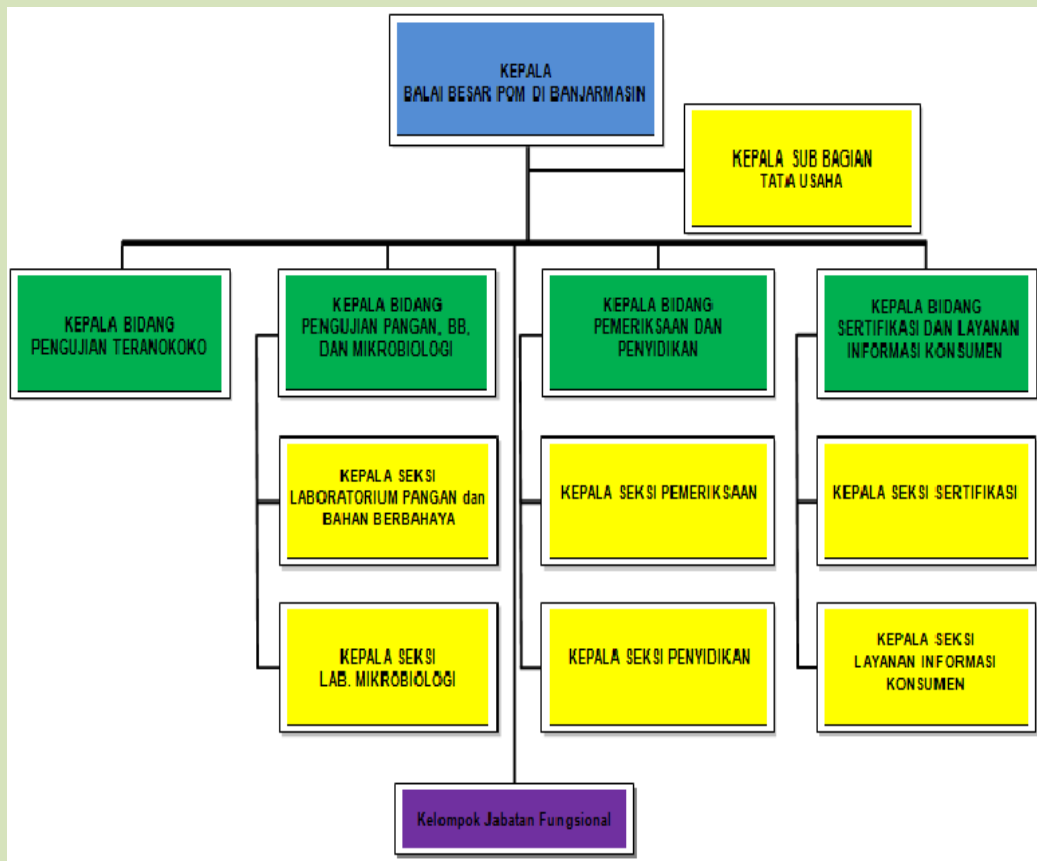
Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, BBPOM di Banjarmasin menyelenggarakan fungsi :

- a) penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan;
- b) pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapeutic, narkotika, psikotropika zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya;
- c) pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi;
- d) pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi;
- e) investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum;
- f) pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- g) pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen;
- h) evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan;
- i) pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan; dan
- j) pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sesuai dengan bidang tugasnya.

1.2 Struktur Organisasi BBPOM di Banjarmasin

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 14 tahun 2014, BBPOM di Banjarmasin diklasifikasikan sebagai Balai Besar tipe B dengan struktur organisasi sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi BBPOM di Banjarmasin

Adapun tugas dan fungsi masing-masing Bidang/Seksi/Subbagian adalah sebagai berikut :

1. Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen.

Tugas Pokok :

- penyusunan rencana dan program,
- evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium,
- pengujian dan penilaian mutu di bidang produk terapeutik, narkotika, obat tradisional, kosmetika, dan produk komplemen

2. Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi

Tugas Pokok

- melaksanakan penyusunan rencana dan program,
- evaluasi dan laporan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium,

Fungsi

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pengelolaan laboratorium, pengendalian mutu hasil pengujian pangan dan bahan berbahaya

<ul style="list-style-type: none"> ● pengujian dan penilaian mutu di bidang pangan dan bahan berbahaya ● pemeriksaan laboratorium, pengujian dan pengendalian mutu di bidang mikrobiologi 	b. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pengelolaan laboratorium dan pengendalian mutu hasil pengujian mikrobiologi.
---	---

2.a Seksi Laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya

Tugas :

- menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program,
- evaluasi dan laporan pengelolaan laboratorium,
- pengendalian mutu hasil pengujian pangan dan bahan berbahaya

2.b Seksi Laboratorium Mikrobiologi

Tugas :

- menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program,
- evaluasi dan laporan pengelolaan laboratorium, dan
- pengendalian mutu hasil pengujian mikrobiologi

3. Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan

Tugas	Fungsi
<ul style="list-style-type: none"> ● penyusunan rencana dan program, ● evaluasi dan laporan pemeriksaan setempat, ● pengambilan contoh untuk pengujian, ● pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sarana pelayanan kesehatan ● penyidikan pelanggaran hukum di bidang produk terapeutic, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan, dan bahan berbahaya. 	<p>a. Penyusunan rencana dan program pemeriksaan, dan penyidikan Obat dan Makanan.</p> <p>b. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sarana pelayanan kesehatan di bidang produk terapeutic, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan, dan bahan berbahaya;</p> <p>c. Pelaksanaan penyidikan terhadap kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapeutic, narkotika, psikotropika dan zata diktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan, dan bahan berbahaya;</p> <p>d. Evaluasi dan penyusunan laporan</p>

	pemeriksaan dan penyidikan Obat dan Makanan.
3.a Seksi Pemeriksaan	
<p>Tugas</p> <ul style="list-style-type: none"> ● melakukan pemeriksaan setempat, ● pengambilan contoh untuk pengujian, ● pemeriksaan sarana produksi dan distribusi produk terapeutic, narkotika, psicotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen, pangan, dan bahan berbahaya 	
3.b Seksi Penyidikan	
<p>Tugas :</p> <p>melakukan penyidikan terhadap kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapeutic, narkotika, psicotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen, pangan, dan bahan berbahaya.</p>	
4. Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen.	
Tugas	Fungsi
<ul style="list-style-type: none"> ● melaksanakan penyusunan rencana dan program, ● evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu, dan layanan informasi konsumen. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan rencana dan program sertifikasi produk, dan Layanan Informasi Konsumen b. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu c. Pelaksanaan layanan informasi untuk konsumen d. Evaluasi dan penyusunan laporan sertifikasi produk, dan layanan informasi konsumen
4.a Seksi Sertifikasi	
<p>Tugas :</p> <p>Melakukan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu.</p>	
4.b Seksi Layanan Informasi Konsumen	
<p>Tugas :</p> <p>melakukan layanan informasi konsumen.</p>	
5. Sub Bagian Tata Usaha.	
<p>Tugas</p> <p>Memberikan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan BBPOM di Banjarmasin.</p>	

1.3 Aspek Strategis Organisasi

Peran BBPOM di Banjarmasin sebagai UPT Badan POM di Provinsi Kalimantan Selatan dalam realitasnya mempunyai posisi yang strategis karena berkaitan dengan tugas utama pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pusat, yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat/konsumen dari bidang Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Selain merupakan kebutuhan dasar manusia produk Obat dan Makanan juga memiliki risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat apabila tidak dikelola dengan benar atau penggunaan produk-produk tersebut tidak tepat atau disalahgunakan. Oleh karena itu perlu dilakukan pengaturan dan pengawasan yang baik (*Good Regulatory Practices*) agar produk-produk tersebut mempunyai mutu, keamanan dan khasiat/kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut BBPOM di Banjarmasin perlu menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat/konsumen, perluasan akses produk bagi masyarakat luas dengan kepentingan strategis lainnya yang berkaitan dengan perekonomian daerah dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kondisi sarana produksi di Provinsi Kalimantan Selatan baik industri makanan, obat tradisional dan kosmetik dengan kategori UMKM, pada umumnya masih lemah dalam pengetahuan maupun modal usaha. Hal ini berimplikasi pada perlunya pengawasan khusus yang mengedepankan aspek pembinaan, aspek pendampingan dan aspek fasilitasi sehingga potensi daerah dan kearifan lokal dapat terjaga bahkan bila perlu dikembangkan. Oleh karena itu dalam menjalankan konsep pengawasan harus melibatkan dan bersinergi dengan lintas sektor terkait, khususnya untuk aspek pendanaan/fasilitasi (bantuan modal/teknologi produksi).

1.4 Analisis Lingkungan Strategis

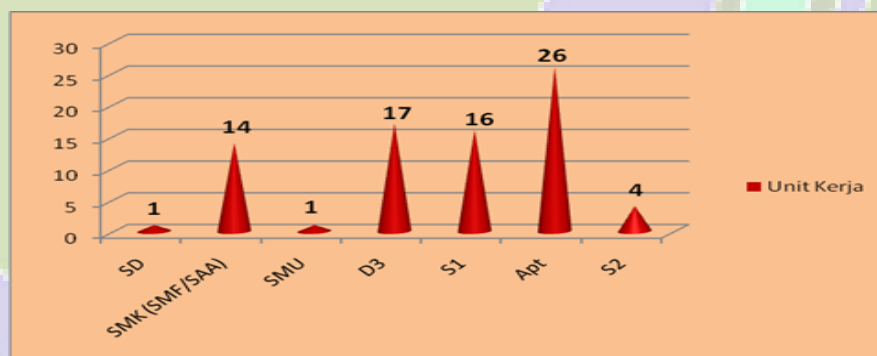
BBPOM di Banjarmasin perlu melakukan analisis terhadap lingkungan strategis agar dapat melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan secara optimal. Lingkungan strategis terdiri dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal.

Internal

Lingkungan internal yang berkorelasi secara langsung dengan upaya pencapaian target kinerja adalah tersedianya jumlah dan kompetensi SDM yang memadai dan ketersediaan sarana prasarana yang terkait langsung dengan pengawasan Obat dan Makanan. Ketersediaan sarana prasarana yang memenuhi standard secara memadai mutlak diperlukan agar BBPOM di Banjarmasin dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Ketersediaan sarana prasarana saat ini belum menggembirakan karena tingkat ketersediaannya baru mencapai 69,30% Sekaitan dengan hal di atas, dalam rangka peningkatan sistem pengawasan Obat dan

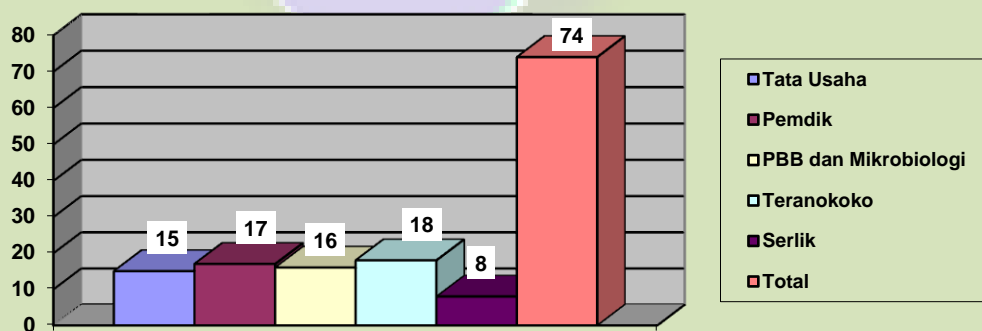
Makanan di Provinsi Kalimantan Selatan, harus dilakukan upaya perkuatan infrastruktur BBPOM di Banjarmasin. Saat ini ketersediaan alat laboratorium pada BBPOM di Banjarmasin belum mencapai kondisi ideal dan masih memerlukan penambahan beberapa alat laboratorium utama seperti HPLC, FTIR, GC-MS, LC-MSMS dan alat untuk uji DNA babi. Akan tetapi mengingat keterbatasan ruang laboratorium maka pengadaan alat laboratorium perlu dilakukan dengan skala prioritas, yaitu hanya melakukan pengadaan yang memenuhi standar GLP yang ditetapkan oleh PPOMN, urgen dan mendesak. Pengadaan alat laboratorium lainnya akan dilakukan setelah ruangan mencukupi. Menghadapi tantangan ini, saat ini infrastruktur yang mendesak untuk segera dipenuhi adalah pengadaan jasa konstruksi/bangunan yang mencukupi untuk kantor dan laboratorium yang representatif yang bisa memenuhi kebutuhan sampai dengan dua puluh lima tahun ke depan.

Adapun data pegawai BBPOM di Banjarmasin per 31 Desember 2017 berjumlah 74 (tujuh puluh empat) orang. Berikut ini grafik yang menggambarkan proporsi pegawai Balai Besar POM di Banjarmasin berdasarkan jenis pendidikan.



Gambar 2. Grafik Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

Profil pegawai per unit kerja dapat dilihat secara rinci sebagai berikut :



Gambar 3. Grafik Jumlah Pegawai Menurut Unit Kerja

Penambahan jumlah SDM yang tidak sesuai dengan yang diperlukan memaksa unit kerja memaksimalkan SDM yang ada. Hal ini tentu diperlukan program peningkatan kapasitas terhadap SDM BBPOM di Banjarmasin, yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan ***In-house Training, In-Job Training***, Bimtek, magang dan pelatihan teknis lainnya yang diselenggarakan oleh Badan POM atau BB/Balai POM lain atau instansi lainnya.

Eksternal

Provinsi Kalimantan Selatan secara geografis terletak antara : 114 19' 13" – 116 33' 28" Bujur Timur dan 1 21' 49" – 4 10' 14" Lintang Selatan. Provinsi Kalimantan Selatan terletak di bagian selatan pulau Kalimantan. Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah, sebelah timur adalah Selat Makasar, sebelah selatan adalah Laut Jawa dan sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur. Luas wilayahnya adalah sekitar 37.530,52 km² atau sekitar 6,98 persen dari luas Pulau Kalimantan dan 1,96 persen dari luas wilayah Indonesia.

Tanah di Kalimantan Selatan sebagian besar berupa hutan (42,99%) kemudian padang semak-semak, alang-alang, rumput (22,13%). Sekitar 11,63% lahan digunakan untuk lahan perkebunan dan 11,35% untuk persawahan. Penggunaan lahan untuk pemukiman hanya sekitar 1,59% dan untuk pertambangan sekitar 1,12%. (Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan).

a. Data Umum Wilayah Kerja

Luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan adalah 37.530,52 km² yang secara Administratif wilayahnya terdiri dari 13 Kabupaten/Kota, 119 Kecamatan dan 1947 Desa/Kelurahan.

Transportasi ke wilayah kerja melalui darat adalah sebesar 99,77%, melalui laut/selat 0,15%, melalui sungai 0,08%, dan melalui udara 0,00%. Lama waktu perjalanan ke wilayah kerja (diasumsikan ke Ibukota Kab/Kota) rata-rata 3,85 jam, dengan waktu terlama 8,50 jam dan waktu tersingkat 1 jam. Waktu untuk melaksanakan kegiatan di satu wilayah kerja rata-rata 2,75 hari dengan waktu terlama 4 hari dan tersingkat 1 hari.

b. Jumlah Sasaran Pengawasan

Sasaran pengawasan di Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan akhir tahun 2017 berjumlah 5.281 sarana, yang terdiri dari 1.557 sarana produksi, 2.607 sarana distribusi dan 1.117 sarana pelayanan sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini :

JENIS SARANA	PRODUKSI	DISTRIBUSI	PELAYANAN	Jumlah
OBAT	0	54	1.117	1.171
Kosmetika	11	384	-	395
Bahan Berbahaya	0	4	-	4
Obat Tradisional	8	296	-	304
MAKMIN (MD dan PIRT)	1.538	928	-	2.466
JUMLAH	1.557	1.666	1.117	4.340

Tabel 1. Sasaran Pengawasan di Provinsi Kalimantan Selatan

Secara umum, sebaran sarana produksi dan distribusi/pelayanan di Kalimantan Selatan sebagian besar berada di kota Banjarmasin sebagai Ibukota Provinsi, yaitu sebesar 34,45%, sisanya tersebar hampir merata di 12 Kabupaten/Kota lainnya. Oleh sebab itu, pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi di Kota Banjarmasin harus lebih intensi dengan proporsi yang lebih besar dibanding dengan kabupaten/kota lainnya. Gambaran sebaran sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan pada setiap kabupaten/kota di Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :



Gambar 4. Grafik Sebaran Sarana Produksi dan Distribusi/Pelayanan

1.5 Isu Strategis

BBPOM di Banjarmasin perlu mengidentifikasi dan melakukan langkah antisipasi terhadap berbagai permasalahan yang mungkin terjadi agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Berbagai isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerja BBPOM di Banjarmasin, antara lain adalah :

1) Peredaran Produk Ilegal

Dengan berlakunya era pasar bebas ASEAN, Indonesia sebagai salah satu Negara peserta AFTA harus siap melaksanakan pasar bebas dan juga pasar bebas ASEAN – CHINA yang mulai berlaku sejak tahun 2010 dan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dengan adanya pasar bebas tersebut produk bebas keluar masuk ke wilayah Indonesia sehingga memberikan peluang besar beredarnya produk-produk ilegal yang tidak memenuhi

syarat (TMS) baik yang diproduksi di dalam maupun di luar negeri, misalnya obat, obat tradisional dan kosmetik. Adanya peredaran produk ilegal/TMS tentu merupakan tantangan tersendiri yang memerlukan penanganan yang komprehensif agar masyarakat terhindar dari resiko penggunaannya. Pengawasan perlu dioptimalkan agar Obat dan Makan yang beredar senantiasa memenuhi persyaratan mutu dan keamanan serta kasiat/manfaat.

Melihat letak geografis dan tantangan yang ada, jumlah sumber daya manusia (SDM) BBPOM di Banjarmasin belum memadai untuk dapat melakukan pengawasan secara komprehensif. Oleh karena itu pengawasan harus dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dengan *stakeholder* khususnya Pemerintah Daerah, Kepolisian dan Instansi terkait lainnya.

2). Maraknya Peredaran “Pil Jin” /Carnophen

Di wilayah Kalimantan selatan banyak beredar obat ilegal “Pil Jin” yang mengandung PCC (Paracetamol, Caffein, Carisoprodol) ilegal. Hal ini dibuktikan dengan maraknya kasus penyalahgunaan “Pil Jin” dan banyaknya sampel pihak ketiga dari kepolisian terkait barang bukti berupa PCC. BBPOM di Banjarmasin berhasil membongkar tindak pidana pendistribusian obat ilegal pada saat kegiatan operasi gabungan nasional antara PPNS Badan POM dengan Tim khusus Polres Kota Banjarmasin dengan temuan obat yang disalahgunakan seperti carnophen, tramadol, trihexyphenidyl sebanyak 11.717.560 butir dengan perkiraan nilai ekonomi sebesar Rp.43.664.696.000,-. Temuan ini merupakan salah satu pengungkapan kasus dengan nilai ekonomi terbesar di lingkup Badan POM. Namun hal ini hanya merupakan langkah awal yang perlu untuk ditingkatkan lagi sehingga peredaran dan penyalahgunaan obat PCC dapat dihilangkan.

3) Penyalahgunaan Bahan Berbahaya pada Pangan

Masih ditemukannya produk pangan yang mengandung bahan berbahaya seperti Boraks, Rhodamin, Formalin khususnya produk pangan hasil Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), karena masyarakat/pelaku usaha IRTP mudah memperoleh bahan berbahaya tersebut. Hal ini disebabkan Peraturan tentang Bahan Berbahaya belum tersosialisasi dengan baik kepada distributor, pengecer, maupun pengguna akhir. Disisi lain pengetahuan pemilik/penanggung jawab IRTP belum memadai untuk menghasilkan produk pangan yang aman dan bermutu.

Kondisi tersebut di atas merupakan tantangan tersendiri dan memerlukan strategi pendekatan yang tepat agar IRTP dapat memproduksi pangan dengan keamanan dan mutu yang terjamin. Pendekatan ini perlu dilakukan karena IRTP adalah aset daerah dan merupakan kekuatan ekonomi rakyat yang perlu dibina agar mampu memproduksi pangan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan.

4) Penyalahgunaan BKO pada Obat Tradisional

Sebagai akibat dari perdagangan bebas maka kemungkinan membanjirnya obat-obat tradisional asing yang akan masuk ke Indonesia. Kondisi ini semakin memperbesar peluang masuknya obat tradisional yang keamanan dan mutunya tidak dapat dipertanggung-jawabkan karena adanya penambahan bahan kimia obat (BKO) pada produk obat tradisional. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan namun kenyataannya di peredaran masih dijumpai obat tradisional yang mengandung BKO.

Pelaku usaha memanfaatkan keinginan masyarakat yang mengharapkan jamu “**cespleng**”. Dengan demikian diharapkan pengawasan terhadap obat tradisional perlu dilakukan secara intensif agar obat tradisional yang dikonsumsi masyarakat terjamin mutu dan keamanannya atau memenuhi syarat (MS).

5) Penjualan Obat dan Makanan Secara Online

Dengan era keterbukaan yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi (TI), pelaku usaha tidak ketinggalan dalam memanfaatkan teknologi informasi, yaitu penjualan Obat dan Makanan secara online. Transaksi online cenderung sulit diawasi karena alamat penjual tidak diketahui dengan pasti, sehingga tidak menutup kemungkinan dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk menjual produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan. Untuk menghadapi hal tersebut BBPOM di Banjarmasin akan lebih intensif dalam pemberdayaan dan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang obat dan makanan. Salah satunya adalah memanfaatkan TI berbasis internet untuk menyebarluaskan informasi obat dan makanan.

6) Rendahnya Tingkat Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu

Iklan yang gencar dilakukan oleh pelaku usaha Obat dan Makanan baik melalui media cetak, media elektronik, maupun pemanfaatan internet sangat membantu mereka dalam pemasaran dan penjualan. Gencarnya iklan tersebut membuat masyarakat menjadi sangat mudah percaya dengan iklan karena tingkat pendidikan dan pengetahuan sebagian besar masyarakat kita masih rendah. Kondisi ini sangat memungkinkan masyarakat tidak dapat memilih Obat dan Makanan yang memenuhi syarat mutu dan keamanan. Untuk melindungi masyarakat dari produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, diperlukan program dan kegiatan untuk memberdayakan masyarakat dalam menghadapi gempuran iklan Obat dan Makanan. Di samping pemberdayaan masyarakat, upaya lain yang akan dilakukan adalah intensifikasi pengawasan iklan Obat dan Makanan. Dalam rangka intensifikasi pengawasan iklan Obat dan Makanan, mutlak diperlukan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, misalnya tersedianya TV dan Radio yang memiliki fungsi/fitur *auto record*, sehingga memudahkan pengawas untuk memantau iklan.

7) Pengawasan Obat Jaminan Kesehatan Nasional.

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak menuju terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu program kegiatan dari SJSN adalah menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Untuk itu perlu dilakukan penjaminan terhadap mutu obat yang digunakan pada program JKN. Implementasi SJSN membawa dampak terhadap pengawasan distribusi dan pelayanan obat di Kalimantan Selatan. Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah permohonan pemeriksaan sarana distribusi obat dalam rangka pemenuhan CDOB. Selain itu, pengawasan terhadap keamanan dan mutu obat JKN dan sarana pelayanan obat yang digunakan dalam memberikan Jaminan Kesehatan Nasional juga perlu mendapat perhatian.

8) Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Badan POM melaksanakan reformasi birokrasi (RB) sesuai peraturan pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Pelaksanaan RB merupakan pengungkit dalam pencapaian sasaran strategis. Sesuai kebijakan Badan POM yang sungguh-sungguh mengimplementasikan RB, BBPOM di Banjarmasin berupaya untuk terus meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan. Hal ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi BBPOM di Banjarmasin secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran, menciptakan birokrasi yang bermental melayani sehingga kualitas pelayanan publik BBPOM di Banjarmasin meningkat, perkuatan peraturan, meningkatkan akuntabilitas kinerja, penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, nepotisme, perlunya pengelolaan SDM yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya serta menjaga pola pikir dan budaya kerja yang baik.

Sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, BBPOM di Banjarmasin sebagai UPT Badan POM berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan yang cepat, waktu yang pasti, transparan, berkualitas, akuntabel kepada seluruh pemangku kepentingan. Komitmen tersebut dilakukan melalui penerapan sistem mutu secara konsisten dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin Tahun 2015 – 2019 disusun dengan mengacu kepada Renstra Badan POM sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan POM No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan POM tahun 2015 – 2019. Renstra BBPOM di Banjarmasin berisi Visi, Misi dan Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan Strategi, Program, dan Program Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi BBPOM di Banjarmasin dalam rangka mendukung capaian Sasaran Badan POM. Renstra BBPOM di Banjarmasin berfungsi sebagai acuan dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan serta sebagai dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan BBPOM di Banjarmasin.

Visi, Misi dan Tujuan

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Badan POM, BBPOM di Banjarmasin dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan senantiasa mengacu pada visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Badan POM sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan POM nomor 2 tahun 2015. Adapun visi, misi dan tujuan tersebut adalah :



Sasaran Strategis dan Indikator

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan, melalui Renstra BBPOM di Banjarmasin menetapkan Sasaran Strategis yang hendak dicapai oleh organisasi selama periode tahun 2015 – 2019. Penetapan Renstra BBPOM di Banjarmasin tentunya juga mengacu kepada Renstra Badan POM tahun 2015 – 2019.

Adapun sasaran strategis, indikator, target indikator dan cara pengukuran masing-masing indikator yang ditetapkan dalam Renstra BBPOM di Banjarmasin tahun 2017 adalah sebagai berikut :

SS 1 : Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

Indikator	Target	Cara Pengukuran
Persentase obat yang memenuhi syarat *)	93%	Jumlah sampel obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan yang mendapatkan izin edar dari Badan POM dengan hasil uji memenuhi syarat dibandingkan dengan jumlah total sampel yang diuji sesuai parameter kritis yang sudah ditetapkan.
Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat *)	62%	
Persentase kosmetik yang memenuhi syarat *)	91%	
Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat *)	81%	
Persentase makanan yang memenuhi syarat *)	76%	

*) Indikator Kinerja Utama (IKU)

SS 2 : Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat

Indikator	Target	Cara Pengukuran
Tingkat Kepuasan Masyarakat	83%	Jumlah pelanggan yang menyatakan puas atas pelayanan pengujian laboratorium yang telah dilakukan oleh BBPOM di Banjarmasin.
Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	11	Identifikasi pemerintah kabupaten/kota yang telah menganggarkan dan melaksanakan kegiatan pengawasan/pembinaan Obat dan Makanan melalui kegiatan pemeriksaan setempat sarana, KIE, bimbingan teknis dan lain-lain.

SS 3 : Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Badan POM

Indikator	Target	Cara Pengukuran
Nilai SAKIP BBPOM di Banjarmasin dari Badan POM	81(A)	Nilai SAKIP BBPOM di Banjarmasin dari Badan POM.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Adapun Perjanjian Kinerja BBPOM di Banjarmasin adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase obat yang memenuhi syarat	93 %
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	62 %
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	91 %
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	81 %
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	76 %
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	83
		Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	11 Kab/Kota
3	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP dari Badan POM	(A)

Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan

1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2.800 sampel
		Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100%
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	5,80 %
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	28,15 %
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan	9 Perkara

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat			
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik BB/BPOM	1.025 Layanan
		Jumlah komunitas yang diberdayakan	26 Komunitas
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai BPOM			
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	70 %
2	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10 Dokumen

Tabel 2. Perjanjian Kinerja BBPOM di Banjarmasin Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama (IKU) BBPOM di Banjarmasin mengikuti IKU Badan POM sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan POM Nomor HK.04.21.02.16.0539 tahun 2016, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Adapun Indikator Kinerja Utama BBPOM di Banjarmasin tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat di Provinsi Kalimantan Selatan, target sebesar 93,00 %.
2. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Kalimantan Selatan, target sebesar 62,00 %.
3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Kalimantan Selatan, target sebesar 91,00 %.
4. Persentase Suplemen Makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Kalimantan Selatan, target sebesar 81,00 %.
5. Persentase Makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Kalimantan Selatan, target sebesar 76,00 %.
6. Tingkat Kepuasan Masyarakat, target sebesar 83,00 %.

2.3 Kriteria Pencapaian Indikator

Untuk mencapai indikator kinerja masing-masing sasaran strategis tersebut di atas, tahun 2017 BBPOM di Banjarmasin melaksanakan berbagai kegiatan.

Pengukuran pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan mengukur capaian indikator masing-masing sasaran strategis. Pengukuran dilakukan dengan menghitung realisasi setiap indikator dari masing-masing sasaran strategis sesuai dengan definisi operasional yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Mengingat bahwa pengukuran pencapaian sasaran strategis semuanya menggunakan indikator positif (semakin tinggi realisasinya semakin baik kinerjanya), maka pengukuran pencapaian dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, nilai pencapaian sasaran dihitung berdasarkan capaian rata-rata indikator dari sasaran. Indikator kinerja utama (IKU) diberi bobot lebih tinggi (2 kali) dibandingkan indikator lainnya. Berikut adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):

$$\text{NPS} = \frac{\{(bobot \times \text{capaian})_1 + (bobot \times \text{capaian})_2 + \dots + (bobot \times \text{capaian})_n\}}{N}$$

Dalam Laporan Kinerja ini, kriteria pencapaian indikator kinerja (X) yang digunakan adalah :

Kriteria	Capaian Target Indikator
Memuaskan	$100\% < X \leq 125\%$
Baik	100%
Cukup	$75\% \leq X < 100\%$
Kurang	$X < 75\%$
Tidak dapat disimpulkan	$X > 125\%$

Tabel 3. Kriteria Penilaian Terhadap Pencapaian Indikator

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis BBPOM di Banjarmasin guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2017 terhadap target yang telah ditetapkan. Salah satu cara menganalisis capaian tahun 2017 adalah dengan membandingkan capaian tahun 2017 terhadap capaian tahun-tahun sebelumnya, target 2019 dan capaian BBPOM di Mataram tahun 2017. Selanjutnya dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Berdasarkan kriteria pencapaian indikator sasaran sebagaimana telah dituangkan pada Bab II, capaian sasaran strategis BBPOM di Banjarmasin tahun 2017, dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Kriteria Pencapaian	
		Capaian BBPOM Banjarmasin (NPS)	Capaian BBPOM Mataram (NPS)
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	116,58 %	109,02 %
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	100,19 %	118,97 %
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BBPOM di Banjarmasin	89,21 %	91,03 %

Tabel 4. Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2017

Dari data tersebut di atas, pada tahun 2017 BBPOM di Banjarmasin dapat mencapai ketiga sasaran strategis yang ditetapkan. Pencapaian ini tentunya perlu dipertahankan dan diupayakan untuk ditingkatkan agar BBPOM di Banjarmasin lebih optimal lagi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

Perbandingan capaian BBPOM di Mataram, terlihat bahwa NPS Sasaran Strategis-1 BBPOM di Banjarmasin (NPS-1 = 116,58) lebih tinggi dibanding BBPOM di Mataram (NPS-1 =(109,02) Hal ini menunjukkan bahwa BBPOM di Banjarmasin lebih optimal dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Untuk Sasaran Strategi-2 BBPOM di Banjarmasin mencapai nilai yang lebih rendah dari BBPOM di Mataram. Untuk itu BBPOM di Banjarmasin perlu meningkatkan advokasi kepada *stakeholders*, bimbingan kepada pelaku usaha dan pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha yang pada akhirnya mendukung sasaran strategis yang pertama. Adapun perbandingan NPS Sasaran Strategis S-3 terlihat bahwa BBPOM di Mataram lebih baik dibandingkan dengan BBPOM di Banjarmasin. Untuk itu BBPOM di Banjarmasin perlu terus meningkatkan kinerja yang diikuti dengan monitoring dan evaluasi serta dilaporkan melalui LAKIP dengan baik agar dapat meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan BBPOM di Banjarmasin.

Kriteria **cukup** pada capaian sasaran strategis ketiga “Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM”. hanya didapat dari capaian satu indikator saja yaitu Nilai SAKIP BBPOM oleh Badan POM. Bila dibandingkan dengan capaian BBPOM di Mataram, capaian BBPOM di Banjarmasin lebih rendah, namun dengan nilai yang lebih rendah, BBPOM di Banjarmasin bisa mendapatkan capaian NPS yang lebih tinggi dari sisi pengawasan obat dan makanan sehingga mampu melindungi masyarakat secara efektif dan efisien dari produk obat dan makanan yang berisiko bagi kesehatan masyarakat. Hal ini menjadi penting untuk dilakukan karena indikator Sasaran Strategis-3 hanya satu, yaitu nilai SAKIP dari Badan POM.

Indikator Kinerja Utama (IKU) BBPOM di Banjarmasin mengikuti IKU Badan POM sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan POM Nomor HK.04.21.02.16.0539 tahun 2016, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Adapun capaian Indikator Kinerja Utama BBPOM di Banjarmasin tahun 2017 adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Persentase Capaian	Kriteria
1.	Persentase obat yang memenuhi syarat	93	97,46	104,80 %	Memuaskan
2.	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	62	80,42	129,70 %	Tidak dapat disimpulkan
3.	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	91	94,43	103,77 %	Memuaskan
4.	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	81	100	123,46 %	Memuaskan
5.	Persentase makanan yang memenuhi syarat	76	92,08	121,16 %	Memuaskan
6.	Tingkat Kepuasan Masyarakat	83	83,23	100,28 %	Memuaskan

Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Utama BBPOM di Banjarmasin

Dari data tersebut di atas, terlihat bahwa pada tahun 2017 hampir semua target IKU BBPOM di Banjarmasin dapat tercapai dengan kriteria Memuaskan, kecuali persentase obat tradisional yang memenuhi syarat yang kriteria penilaiannya Tidak Dapat Disimpulkan karena capaiannya sebesar 129,70%. Perbandingan capaian IKU BBPOM di Banjarmasin dengan capaian BBPOM di Mataram pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2017 (%)		Persentase Terhadap Capaian BBPOM Mataram
		BBPOM Banjarmasin	BBPOM Mataram	
1	Persentase obat yang memenuhi syarat	104,80 %	106.82%	98.11%
2	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	129,70 %	105.49%	122.95%
3	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	103,77 %	107.22%	96.78%
4	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	123,46 %	121.83%	101.34%
5	Persentase makanan yang memenuhi syarat	121,16 %	103.77%	116.76%
6	Tingkat Kepuasan Masyarakat	100,28 %	118.97%	84.29%

Tabel 6. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama BBPOM di Banjarmasin dengan BBPOM di Mataram

Capaian IKU oleh BBPOM di Banjarmasin yang lebih tinggi dibanding capaian BBPOM di Mataram adalah : a) Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat; b) Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat; dan c) Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat. Sedangkan BBPOM di Mataram memiliki capaian IKU yang lebih tinggi pada : a) Persentase Obat yang Memenuhi Syarat; b) Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat; dan c) Tingkat Kepuasan Masyarakat.

BBPOM di Banjarmasin perlu lebih fokus dalam meningkatkan capaian IKU yang lebih rendah dibanding BBPOM di Mataram. Upaya perbaikan yang akan dilakukan adalah meningkatkan pengawasan yang disertai *law enforcement*, pembinaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, serta peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat agar dapat memberi layanan prima sehingga meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat.

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Analisis akuntabilitas pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan mengukur dan menganalisa capaian indikator kinerja dari masing-masing sasaran strategis.

Sasaran Strategis 1 : “Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan”

Pengukuran pencapaian sasaran strategis ini dilakukan dengan mengukur capaian dari kelima indikator kerjanya, yaitu :

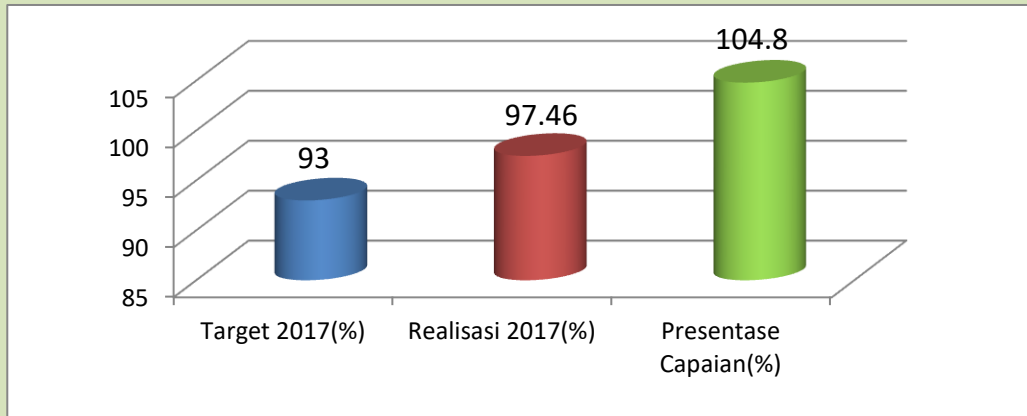
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Persentase Capaian	Kriteria Capaian
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase obat yang memenuhi syarat *)	93	97,46	104,80 %	Memuaskan NPS = 116,58 %
	2. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat *)	62	80,42	129,70 %	
	3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat *)	91	94,43	103,77 %	
	4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat *)	81	100	123,46 %	
	5. Persentase makanan yang memenuhi syarat *)	76	92,08	121,16 %	

*) Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 1 BBPOM di Banjarmasin

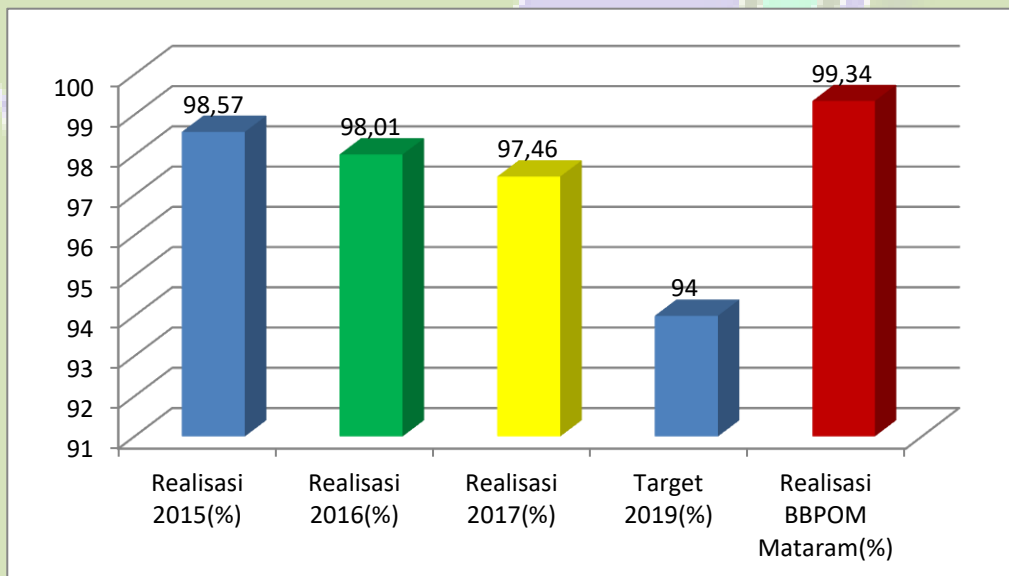
Analisis capaian masing-masing indikator kinerja dari sasaran strategis ini pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat (MS) :



Gambar 6. Grafik Pencapaian Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Adapun gambaran perbandingan realisasi obat yang memenuhi syarat tahun 2017 terhadap realisasi tahun-tahun sebelumnya, target 2019 dan realisasi BBPOM di Mataram adalah sebagai berikut :



Gambar 7. Grafik Perbandingan Realisasi Obat Yang Memenuhi Syarat BBPOM di Banjarmasin

Target persentase obat yang memenuhi syarat (MS) pada tahun 2017 adalah 93%, realisasi sebesar 97,46%, atau mencapai 104,80% dari target dengan kriteria penilaian **memuaskan**. Hal ini berarti bahwa obat yang beredar di Kalimantan Selatan hanya 2,54% yang tidak memenuhi syarat (TMS), sehingga masyarakat relatif terlindungi dari peredaran obat yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan. Capaian ini menunjukkan bahwa:

- a. BBPOM di Banjarmasin dapat memanfaatkan dengan efektif sumber daya yang ada untuk melakukan pengawasan yang disertai dengan **low enforcement**, pembinaan kepada pelaku usaha dan KIE kepada masyarakat sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan dengan **memuaskan**.
- b. Selama tahun 2017, dari 11 kasus yang ditindaklanjuti secara “PRO JUSTITIA”, 7 kasus menyangkut tindak pidana bidang obat. Tindakan **low enforcement** ini berdampak positif terhadap berkurangnya peredaran obat yang tidak memenuhi syarat.
- c. Pembinaan kepada pelaku usaha tentang cara distribusi obat yang baik telah berdampak positif berupa peningkatan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha sehingga mengakibatkan menurunnya peredaran obat yang tidak memenuhi syarat.
- d. Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat berdampak positif berupa peningkatan pemahaman masyarakat terhadap mutu dan keamanan obat. Hal ini menyebabkan masyarakat semakin selektif dalam memilih obat yang akan digunakan/dikonsumsi. Meningkatnya tuntutan masyarakat akan mutu dan keamanan obat, tentunya akan mendorong pelaku usaha untuk senantiasa menjaga mutu dan keamanan obat yang diproduksi/diedarkan sehingga peredaran obat yang tidak memenuhi syarat (TMS) menurun.

Target thn 2017	Realisasi thn 2017	Persentase Capaian thn 2017	Kriteria Penilaian	Target s.d Tahun 2019	% Capaian Terhadap Target Thn 2019	Capaian Tahun 2016	Persentase capaian thn 2017 BBPOM Mataram
93%	97,46%	104,80%	Memuaskan	94,00%	103,68%	98,01%	106,82%

Perbandingan capaian tahun 2017 terhadap capaian tahun 2016 adalah 99.53%. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan sepanjang tahun 2017 dapat menemukan lebih banyak (0,55%) jumlah obat yang tidak memenuhi syarat. Kondisi ini tidak terlepas dari beberapa hal, antara lain :

- a. Membaiknya penetapan pedoman prioritas sampling, sehingga dari awal sudah dapat diidentifikasi sampel yang potensial tidak memenuhi syarat.
- b. Kemampuan petugas dalam melaksanakan kebijakan **random sampling** makin baik
- c. Peningkatan kapasitas laboratorium

Sebagai upaya verifikasi keberhasilan dari pengawasan **post market** untuk mengawal keamanan dan mutu obat yang beredar dilakukan kegiatan sampling dan pengujian. Mengingat tingginya tantangan pengawasan, yaitu jenis obat yang beredar sangat beragam sementara

sumber daya yang dimiliki terbatas, maka pelaksanaan sampling dilakukan berdasarkan analisis risiko dari obat yang beredar. Terhadap obat yang memiliki ijin edar dibagi menjadi 2 kategori yaitu obat *e-catalogue* dan *non e-catalogue*, sedangkan pengujian dilakukan berdasarkan parameter kritis. Dalam hal ini sampling dilakukan di sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kesehatan karena di Kalimantan Selatan tidak ada sarana produksi (industri) obat.

Terhadap obat yang tidak memenuhi syarat tersebut telah dilakukan tindak lanjut sesuai ketentuan dan SOP di lingkungan Badan POM, sehingga peredaran lebih lanjut dari obat yang diketahui tidak memenuhi syarat dapat dihentikan.

Dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 94,00%, menunjukkan bahwa target tahun 2019 sudah tercapai bahkan terlampaui pada tahun 2015. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi dengan menaikkan target persentase obat yang memenuhi syarat, dengan tetap mempertimbangkan perbandingan capaian tahun 2017 dengan capaian tahun 2016 dan capaian tahun 2015.

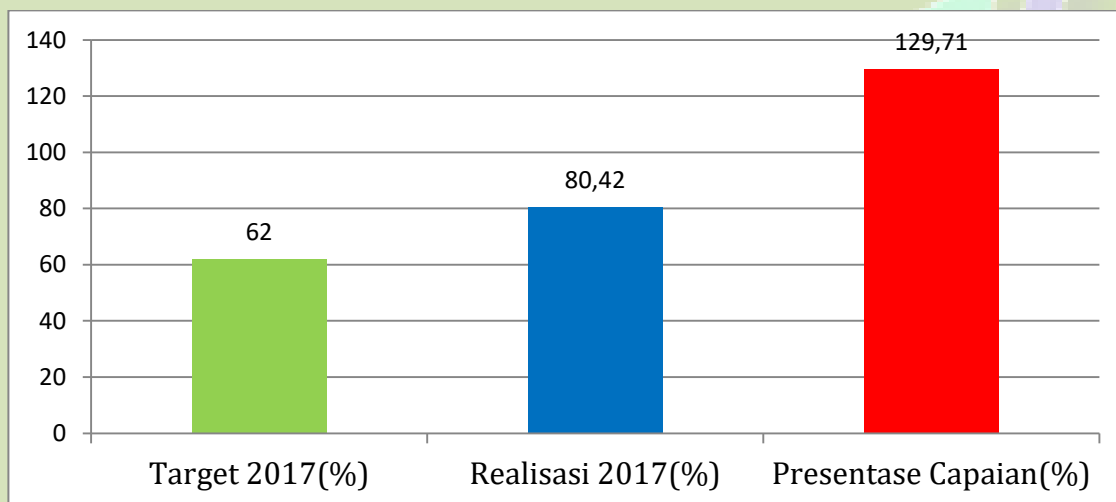
Perbandingan capaian BBPOM di Banjarmasin tahun 2017 sebesar 104,80% dibandingkan dengan capaian BBPOM di Mataram sebesar 106,82% adalah 98,11%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja BBPOM di Banjarmasin dalam melindungi masyarakat dari produk obat yang berisiko terhadap kesehatan perlu ditingkatkan lagi. Meskipun demikian dari sisi pengawasan terhadap produk obat TMS yang beredar, BBPOM di Banjarmasin telah melaksanakan pengawasan dengan baik karena BBPOM dapat menemukan produk TMS lebih banyak sehingga dapat menangkal peredaran produk obat TMS yang berisiko bagi kesehatan masyarakat. Dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 94,00%, menunjukkan bahwa target tahun 2019 sudah tercapai bahkan terlampaui pada tahun 2016. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi dan menaikkan target persentase obat yang memenuhi syarat, dengan tetap mempertimbangkan perbandingan capaian tahun 2016 dengan capaian tahun 2015.

Walaupun capaian persentase obat yang memenuhi syarat memberi hasil penilaian yang memuaskan, akan tetapi dalam rangka optimalisasi perlindungan terhadap masyarakat BBPOM di Banjarmasin perlu terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada pelaksanaan pengawasan serta pembinaan terhadap pelaku usaha dan masyarakat agar bersinergi dalam mewujudkan keamanan, mutu dan khasiat obat yang beredar. Upaya yang akan dilakukan antara lain sebagai berikut :

- ✓ Pemantapan pola tindak lanjut temuan obat TMS
- ✓ Pembinaan secara intensif terhadap sarana distribusi obat agar mampu menerapkan cara distribusi obat yang baik (CDOB)

- ✓ Intensifikasi pengawasan sarana distribusi obat disertai **low enforcement** sesuai tingkat pelanggaran
- ✓ Memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan melalui advokasi dan perkuatan koordinasi lintas sektor guna optimalisasi dan sinergisme pengawasan obat
- ✓ Peningkatan pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)

2. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat



Gambar 8. Grafik Capaian Indikator Persentase Obat tradisional yang MS

Target tahun 2017 adalah 62%. Dari target sebesar 62%, realisasi yang dicapai sebesar 80,42%, sehingga persentase pencapaian kinerja adalah sebesar 129,71%. Dengan data tersebut menunjukkan hasil dengan kriteria **Tidak dapat disimpulkan**. Perbandingan capaian tahun 2017 (80,42%) terhadap realisasi tahun 2016 (73,81%) adalah 108,96%. Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun produk obat tradisional yang beredar semakin membaik (makin aman). Pencapaian ini dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu :

- a) Efektifitas dan dampak positif pengawasan yang dilakukan semakin membaik
- b) Pembinaan kepada pelaku usaha mendorong kepatuhan pelaku usaha
- c) Pengawasan yang disertai "**low enforcement**", baik berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana (tindakan "**Pro Justitia**").
- d) Pembinaan secara intensif terhadap pelaku usaha. Sejak tahun 2016, pembinaan pelaku usaha obat tradisional dilakukan dengan BIMTEK **layout** bangunan industri obat tradisional dan hasilnya semua **layout** yang diajukan peserta (pemilik/penanggung jawab industri) mendapat persetujuan dari Badan POM. Pembinaan tersebut tetap dilanjutkan pada tahun 2017 dengan melakukan bimtek pada masing-masing sarana produksi. Sedang

pembinaan terhadap distributor obat tradisional dilakukan melalui sosialisasi/penyebaran informasi tentang cara distribusi obat tradisional yang baik, pengenalan mutu serta keamanan dan khasiat obat tradisional. Intensifnya pembinaan ini meningkatkan pengetahuan pelaku usaha tentang arti penting keamanan dan mutu serta memahami cara produksi dan distribusi obat tradisional yang baik. Hal ini berdampak pada meningkatnya kepatuhan pelaku usaha sehingga peredaran obat tradisional yang memenuhi syarat di Kalimantan Selatan semakin meningkat.

e) Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang obat tradisional.

Melalui KIE yang dilakukan oleh BBPOM di Banjarmasin, pemahaman masyarakat terhadap mutu dan keamanan obat tradisional meningkat, sehingga masyarakat semakin selektif dalam memilih obat tradisional yang akan digunakan/dikonsumsi. Hal ini mendorong pelaku usaha untuk senantiasa menjaga mutu dan keamanan obat tradisional yang diproduksi/diedarkan, pada akhirnya berdampak pada menurunnya peredaran obat tradisional yang tidak memenuhi syarat (TMS).

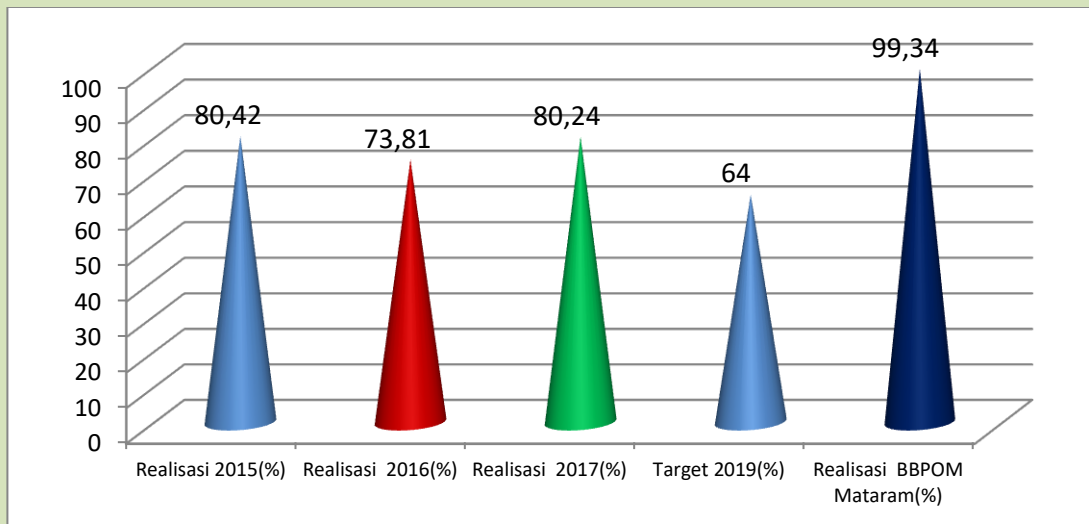
Perbandingan capaian BBPOM di Banjarmasin tahun 2017 sebesar 129,70% dengan capaian BBPOM di Mataram sebesar 105,49% adalah 122,95%. Secara kuantitatif terlihat bahwa kinerja BBPOM di Banjarmasin lebih tinggi dibanding BBPOM di Mataram, hal ini menunjukkan bahwa BBPOM di Banjarmasin sudah melakukan pengawasan obat tradisional di Kalimantan Selatan dengan optimal. Walaupun capaian persentase obat tradisional yang memenuhi syarat memberi hasil tinggi, akan tetapi dalam rangka optimalisasi perlindungan terhadap masyarakat BBPOM di Banjarmasin perlu terus mempertahankan dan meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha dan masyarakat agar bersinergi dalam mewujudkan keamanan dan mutu obat tradisional yang beredar.

Realisasi pada tahun 2017 sebesar 80,42% sudah melampaui target tahun 2019 sebesar 64%. BBPOM di Banjarmasin pada tahun 2017 sudah melakukan reviu terhadap target obat tradisional yang MS, dengan menaikkan target menjadi 80%. Namun hasil reviu renstra tersebut belum dapat digunakan karena belum mendapat persetujuan dari pusat.

Gambaran secara lengkap capaian IKU Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat, adalah sebagai berikut :

Target Thn 2017	Realisasi	Persentase Capaian	Kriteria Penilaian	Target s.d Tahun 2019	Persentase Capaian Terhadap Target 2019	Capaian Tahun 2016	Capaian thn 2017 BBPOM Mataram
62%	80,42%	129,70 %	Tidak dapat disimpulkan	64 %	125,57%	73,81 %	105,49

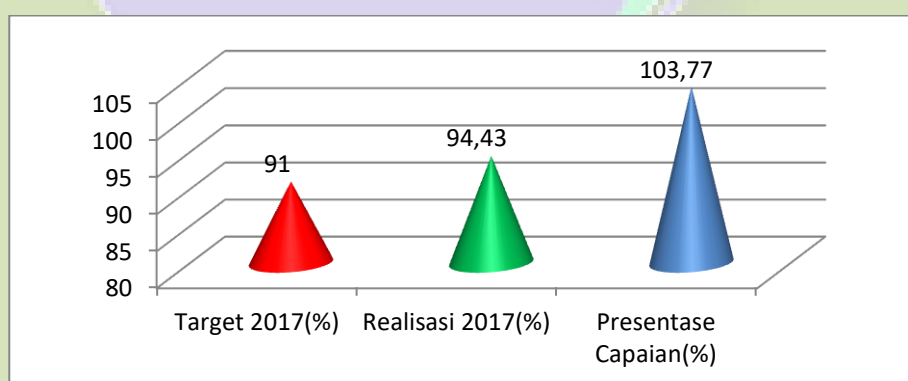
Adapun gambaran perbandingan realisasi obat tradisional yang memenuhi syarat tahun 2017 terhadap realisasi tahun-tahun sebelumnya, target 2019 dan realisasi BBPOM di Mataram adalah sebagai berikut :



Gambar 9 . Grafik Perbandingan Realisasi OT Yang Memenuhi Syarat BBPOM di Banjarmasin

3. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat

Sampling dan pengujian merupakan verifikasi terhadap keberhasilan pengawasan produksi dan distribusi kosmetik. Mengingat tantangan pengawasan kosmetik yang tinggi karena kosmetik yang beredar sangat beragam, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka pelaksanaan sampling untuk pengujian dilakukan berdasarkan analisis risiko dari kosmetik yang beredar. Dalam hal ini sampling dilakukan di sarana produksi (industri) dan distribusi kosmetik. Selama tahun 2017 BBPOM di Banjarmasin telah melakukan pengujian terhadap 844 sampel kosmetik. Pencapaian kinerja BBPOM di Banjarmasin untuk indikator ini mendapat nilai **memuaskan**, karena dari target sebesar 91,00%, dapat direalisasikan sebesar 94,43%, sehingga persentase pencapaian kinerja adalah sebesar 103,77% seperti berikut ini :

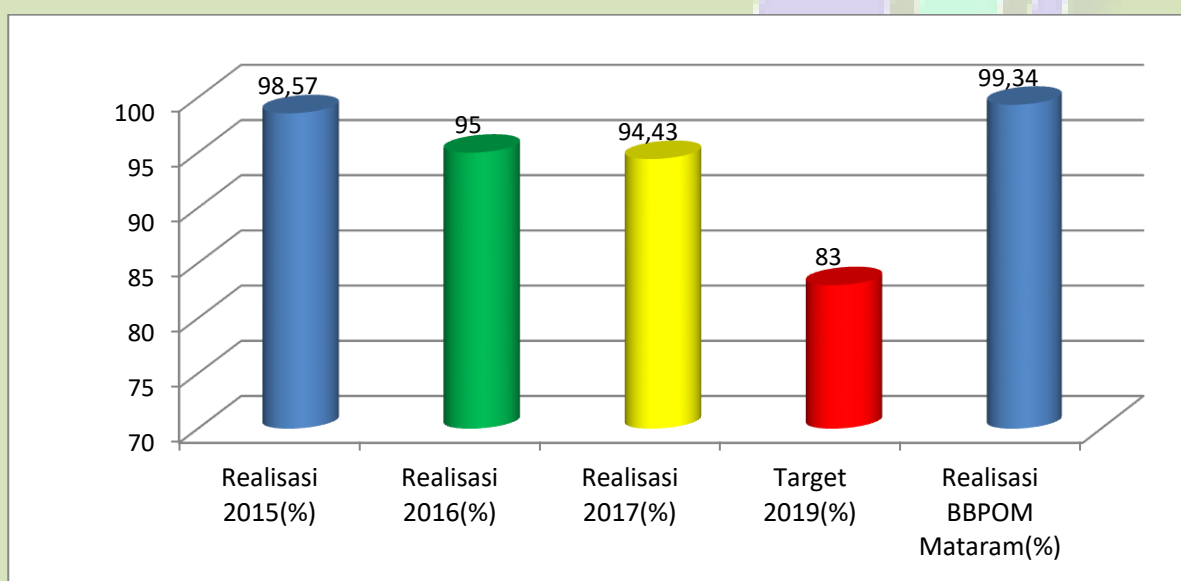


Gambar 10. Grafik Pencapaian Indikator Persentase Kosmetik yang MS

Gambaran secara lengkap capaian IKU Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat, adalah sebagai berikut :

Target thn 2017	Realisasi thn 2017	Persentase Capaian	Kriteria Penilaian	Target s.d Tahun 2019	% Capaian Terhadap Target 2019	Capaian Tahun 2016	Realisasi thn 2017 BBPOM Mataram
91,00 %	94,43 %	103,77 %	Memuaskan	93,00 %	101,54%	97,26%	96,78

Adapun gambaran perbandingan realisasi kosmetik yang memenuhi syarat tahun 2017 terhadap realisasi tahun-tahun sebelumnya, target 2019 dan realisasi BBPOM di Mataram adalah sebagai berikut :



Gambar 11 . Grafik Perbandingan Realisasi Kosmetik Yang Memenuhi Syarat

Perbandingan capaian tahun 2017 dengan realisasi tahun 2016 adalah 97,09%. Mengalami peningkatan jumlah sampel TMS pada tahun 2017 bila dibandingkan dengan tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pengawas dalam menemukan produk kosmetik yang tidak memenuhi syarat makin meningkat. Meningkatnya jumlah temuan kosmetik yang tidak memenuhi syarat dipengaruhi oleh hal-hal berikut

- Meningkatnya kapasitas dan kompetensi Inspektur kosmetik BBPOM di Banjarmasin. Hal ini merupakan dampak positif dari pelatihan yang dilakukan secara berjenjang oleh Badan POM
- Membaiknya penetapan pedoman prioritas sampling, sehingga dari awal sudah dapat diidentifikasi sampel kosmetik yang potensial tidak memenuhi syarat.
- Kemampuan petugas dalam melaksanakan kebijakan *purposive sampling* makin baik
- Peningkatan kapasitas laboratorium

- e. Makin banyaknya peredaran kosmetik sehingga peluang menemukan produk TMS juga meningkat

Terhadap produk kosmetik yang ditemukan tidak memenuhi syarat tersebut telah dilakukan tindak lanjut sesuai ketentuan dan SOP di lingkungan Badan POM, sehingga peredaran lebih lanjut dari produk kosmetik yang diketahui tidak memenuhi syarat dapat dihentikan.

Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Banjarmasin, menunjukkan bahwa hal yang perlu diwaspadai dari produk kosmetik yang TMS adalah masih ditemukannya penggunaan bahan berbahaya berupa penggunaan triklosan dan pewarna merah pada sediaan kosmetik.

Perbandingan capaian BBPOM di Banjarmasin tahun 2017 sebesar 103,77% dibandingkan dengan capaian BBPOM di Mataram sebesar 107,22% adalah 96,78%, Hal ini menunjukkan bahwa kinerja BBPOM di Banjarmasin dalam melindungi masyarakat dari produk kosmetik yang berisiko terhadap kesehatan perlu ditingkatkan lagi. Secara kuantitatif terlihat bahwa kinerja BBPOM di Mataram lebih baik dibanding BBPOM di Banjarmasin, tetapi secara kualitatif hal ini menunjukkan bahwa BBPOM di Banjarmasin mampu menemukan lebih banyak peredaran obat kosmetik yang TMS dibanding BBPOM di Mataram. Kemampuan menemukan peredaran obat tradisional yang TMS ini memberi dampak positif karena peredaran obat tradisional yang TMS ini dapat dicegah secara dini. Sehingga masyarakat lebih terlindungi dari peredaran dan penggunaan kosmetik yang berisiko bagi kesehatan.

Realisasi tahun 2017 sebesar 94,43%, bila dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 93,00 % maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penetapan target karena target tahun 2019 telah tercapai bahkan terlampaui pada tahun 2015.

4. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat

Pada tahun 2017, jumlah sampel suplemen kesehatan yang diuji oleh BBPOM di Banjarmasin berdasarkan parameter kritis adalah 141 sampel. Semua sampel yang diuji memenuhi syarat, sehingga persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat adalah 100%. Realisasi atas indikator kinerja ini adalah sebesar 100% (target 90%), sehingga pencapaian kinerja adalah 111,11% dengan kriteria penilaian **memuaskan**. Capaian ini tidak terlepas dari :

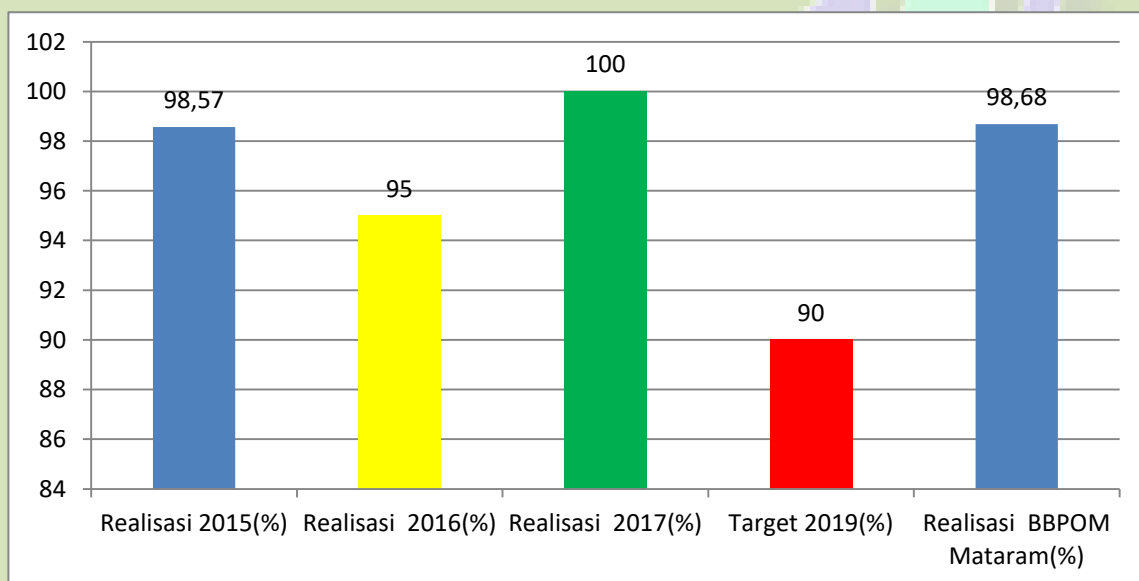
- a. Penetapan target yang proporsional
- b. Efektifitas pelaksanaan pengawasan suplemen kesehatan
- c. Dampak positif dari pelaksanaan KIE kepada masyarakat.

Melalui KIE yang dilakukan, pemahaman masyarakat terhadap mutu dan keamanan suplemen kesehatan meningkat, sehingga masyarakat semakin selektif dalam memilih

suplemen kesehatan yang akan digunakan/dikonsumsi. Kondisi ini mendorong pelaku usaha untuk senantiasa menjaga mutu dan keamanan suplemen kesehatan yang diproduksi/diedarkan, pada akhirnya berdampak pada menurunnya peredaran suplemen kesehatan yang tidak memenuhi syarat (TMS).

d. Suplemen kesehatan umumnya diproduksi oleh industri yang sudah menerapkan GMP, sehingga tentunya keamanan dan mutu suplemen lebih terjamin.

Adapun gambaran perbandingan realisasi suplemen kesehatan yang memenuhi syarat tahun 2017 terhadap realisasi tahun-tahun sebelumnya, target 2019 dan realisasi BBPOM di Mataram adalah sebagai berikut :



Gambar 12 . Grafik Perbandingan Realisasi Suplemen Kesehatan Yang Memenuhi Syarat

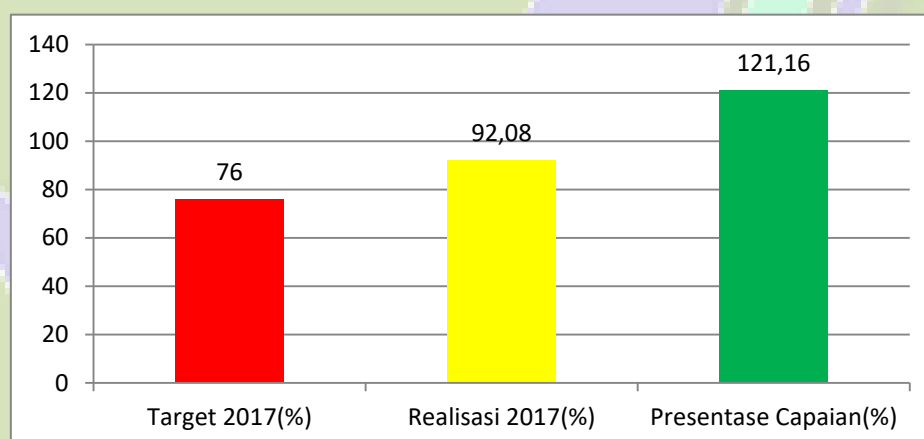
Perbandingan capaian BBPOM di Banjarmasin tahun 2017 sebesar 123,46% dibandingkan dengan capaian BBPOM di Mataram sebesar 121,83% adalah 100,34%, menunjukkan bahwa BBPOM di Banjarmasin lebih optimal dalam melindungi masyarakat dari suplemen kesehatan yang berisiko terhadap kesehatan. Bila capaian tahun 2017 dibandingkan terhadap target tahun 2019 sebesar 83,00% menunjukkan bahwa target tersebut sudah terlampaui pada tahun 2015. Target capaian produk suplemen kesehatan yang MS sudah dinaikkan pada revue renstra tahun 2017, namun hasil reviu renstra ini masih belum dapat digunakan karena belum mendapat persetujuan Pusat.

Gambaran secara lengkap capaian IKU Persentase Suplemen kesehatan yang Memenuhi Syarat, adalah sebagai berikut :

Target thn 2017	Realisasi	Persentase Capaian	Kriteria Penilaian	Target s.d Tahun 2019	Persentase Capaian Terhadap Target 2019	Capaian Tahun 2016	Persentase Capaian thn 2017 BBPOM Mataram
81.00 %	100%	123,46%	Memuaskan	90%	111.11%	95 %	121,83

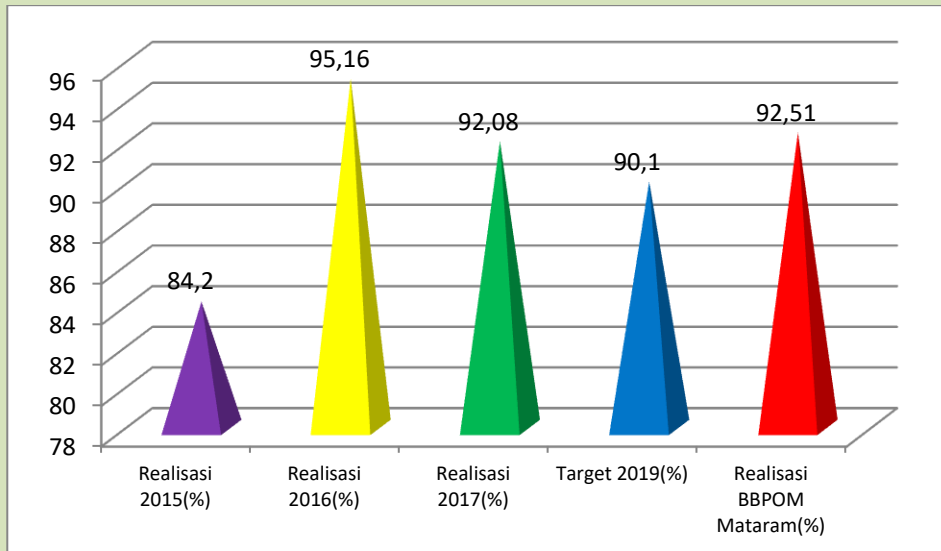
5. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Pada tahun 2017, BBPOM di Banjarmasin telah melakukan sampling pangan sebanyak 848 sampel. Sampling dilakukan pada sarana produksi dan distribusi pangan. Dari 840 sampel tersebut, karena keterbatasan peralatan (belum memiliki PCR) dilakukan uji rujuk ke BBPOM di Mataram sebanyak 6 sampel untuk pengujian DNA babi, sehingga sampel pangan yang diuji berdasarkan parameter kritis oleh BBPOM di Banjarmasin adalah 832 sampel. Target, realisasi dan capaian Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat seperti dibawah ini :



Gambar 13. Grafik Pencapaian Indikator Persentase Makanan yang MS

Adapun gambaran perbandingan realisasi makanan yang memenuhi syarat tahun 2017 terhadap realisasi tahun-tahun sebelumnya, target 2019 dan realisasi BBPOM di Mataram adalah sebagai berikut :



Gambar 14 . Grafik Perbandingan Realisasi Makanan Yang Memenuhi Syarat BBPOM di Banjarmasin

Sampel pangan yang diuji oleh BBPOM di Banjarmasin tersebut terdiri atas :

Jenis Sampel	Jumlah Sampel	Hasil Uji		Persentase hasil Uji	
		MS	TMS	MS	TMS
MD/ML	644	593	55	92.08%	8.54%
SP/PIRT	68	46	22	67.65%	32.35%
Kemasan Pangan	25	25	0	100.00%	0.00%
Pangan siap saji dan PJAS	103	89	14	86.67%	13.33%
TOTAL	840	753	91	89.67%	10.81%

Tabel 8. Rincian Hasil Uji Pangan Berdasarkan Nomor Registrasi

Dari data tersebut di atas terlihat bahwa makanan yang tidak memenuhi syarat dan beredar di masyarakat lebih banyak disebabkan oleh makanan PIRT dan PJAS. Hasil uji tidak memenuhi syarat terhadap pangan PJAS dan PIRT disebabkan oleh rendahnya penerapan hygiene sanitasi serta penggunaan bahan berbahaya yang dilarang digunakan pada pangan dan penggunaan bahan tambahan pangan melebihi batas maksimum yang diperbolehkan. Oleh karena itu perlu dilakukan intervensi yang sesuai guna mewujudkan keamanan pangan. Mengingat pangan ini bukan domain Badan POM tetapi melibatkan *stakeholders*, BBPOM di Banjarmasin perlu lebih memperkuat kemitraan dengan lintas sektor terkait guna sinergisme pengawasan pangan PIRT dan PJAS.

Sesuai dengan defenisi operasional, bahwa yang diperhitungkan adalah sampel makanan yang mendapat izin edar dari Badan POM dalam bentuk MD atau ML, maka yang

diperhitungkan dalam pencapaian makanan yang memenuhi syarat adalah 644 sampel. Hasil uji menunjukkan bahwa 593 sampel memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat sebanyak 55 sampel, sehingga persentase makanan yang memenuhi syarat adalah 92,08%.

Pada tahun 2017, target untuk indikator ini adalah sebesar 76%, realisasi sebesar 92,08%, sehingga persentase pencapaian kinerja adalah sebesar 121,16% dengan kriteria penilaian **memuaskan**. Beberapa faktor yang mempengaruhi capaian ini, yaitu :

- a. Efektifitas pelaksanaan pengawasan makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Banjarmasin, berdampak positif terhadap keamanan makanan yang diproduksi dan diedarkan oleh pelaku usaha (industri makanan).
- b. Perhitungan makanan memenuhi syarat (MS) didasarkan pada penilaian produk makanan yang mendapat izin edar (MD/ML) dari Badan POM.

Penetapan definisi operasional ini berdampak signifikan terhadap perhitungan persentase produk makanan yang memenuhi syarat, karena pangan yang mendapat izin edar dari Badan POM sejak awal dilakukan penapisan/penilaian keamanan pangan dengan baik. Pada tahun-tahun sebelumnya (periode renstra sebelumnya) pengujian pangan jajanan anak sekolah (PJAS) yang merupakan pangan siap saji, dan pangan olahan industri rumah rumah tangga (P-IRTP) diperhitungkan pada pengukuran pencapaian makanan yang memenuhi syarat. Pada tahun 2017 BBPOM di Banjarmasin tetap melakukan pengawasan (pengujian) terhadap PJAS dan P-IRT. Namun mengingat pemberian izin edar terhadap PJAS dan P-IRT bukan kewenangan Badan POM maka tidak diperhitungkan ke dalam capaian indikator.

- c. Menguatnya komitmen **stakeholders**

Salah satu upaya penguatan komitmen **stakeholder** adalah melakukan advokasi. Melalui advokasi kepada **stakeholders** terwujud kesepahaman tentang keamanan dan mutu pangan. Kondisi ini berdampak pada adanya sinergisme antar instansi terkait (**stakeholders**) dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha serta KIE kepada masyarakat, yang pada akhirnya bermuara pada menurunnya peredaran produk pangan yang tidak memenuhi syarat dan berisiko terhadap kesehatan.

- d. Dampak positif dari pelaksanaan KIE

Melalui sinergisme pelaksanaan KIE dengan **stakeholders**, membawa dampak yang menggembirakan, yaitu meningkatnya pengetahuan/pemahaman tentang keamanan dan mutu pangan. Peningkatan pemahaman/pengetahuan keamanan dan mutu pangan melahirkan kesadaran dan ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap keamanan dan mutu pangan itu sendiri. Tingginya tuntutan masyarakat untuk hanya mengonsumsi

pangan yang aman dan bermutu, mendorong pelaku usaha dalam meningkatkan keamanan dan mutu pangan yang diproduksi dan diedarkan.

Perbandingan capaian BBPOM di Banjarmasin tahun 2017 sebesar 121,16% dengan capaian BBPOM di Mataram sebesar 103,77% adalah sebesar 116,76%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja BBPOM di Banjarmasin sudah optimal dalam melakukan pengawasan terhadap makanan yang beredar. Bila dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 90,10% menunjukkan bahwa target tersebut sudah terlampaui. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi terhadap penetapan target. Walaupun sudah melebihi target yang ditetapkan, ke depan BBPOM di Banjarmasin perlu tetap melakukan pengawasan secara optimal terhadap produksi dan distribusi pangan guna menuju kondisi yang ideal (100% memenuhi syarat).

Gambaran secara umum capaian IKU Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat adalah sebagai berikut :

Target thn 2017	Realisasi thn 2017	Persentase Capaian	Kriteria Penilaian	Target s.d Tahun 2019	Persentase Capaian Terhadap Target 2019	Capaian Tahun 2016	Persentase Capaian thn 2017 BBPOM Mataram
76 %	92,08%	121,16%	Memuaskan	90,10 %	99,49%	75,5%	121,16

Sejalan dengan ekspektasi masyarakat dan tuntutan suprasistem Badan POM, hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah perlunya mengusulkan kepada Badan POM agar keamanan PJAS dan PIRT juga dijadikan sebagai bagian dari target indikator kinerja. Disadari bahwa pangan PJAS dan PIRT bukan merupakan domain utama dari Badan POM sehingga pangan ini berada pada area tidak terkendali/terkontrol, akan tetapi melalui advokasi dan koordinasi lintas sektor diharapkan produk pangan ini dapat ditarik ke area yang dipengaruhi. Dengan demikian keberhasilan membina dan mengawasi PJAS dan PIRT dapat menjadi ukuran seberapa besar dampak dari advokasi dan koordinasi lintas sektor yang dilakukan oleh Badan POM.

Sasaran Strategis 1 - Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan adalah :

Sasaran Strategis	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap Produk Obat dan Makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2.800	2.801	100,04
		Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100	100	100
	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang Memenuhi Standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	5,80	6,2	106,90
	Meningkatnya Kualitas Sarana Distribusi yang Memenuhi Standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	28,15	31,01	110,16
	Meningkatnya Hasil Tindak Lanjut Penyidikan Terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	9	11	122,22

Tabel 9. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategi 1 BBPOM di Banjarmasin

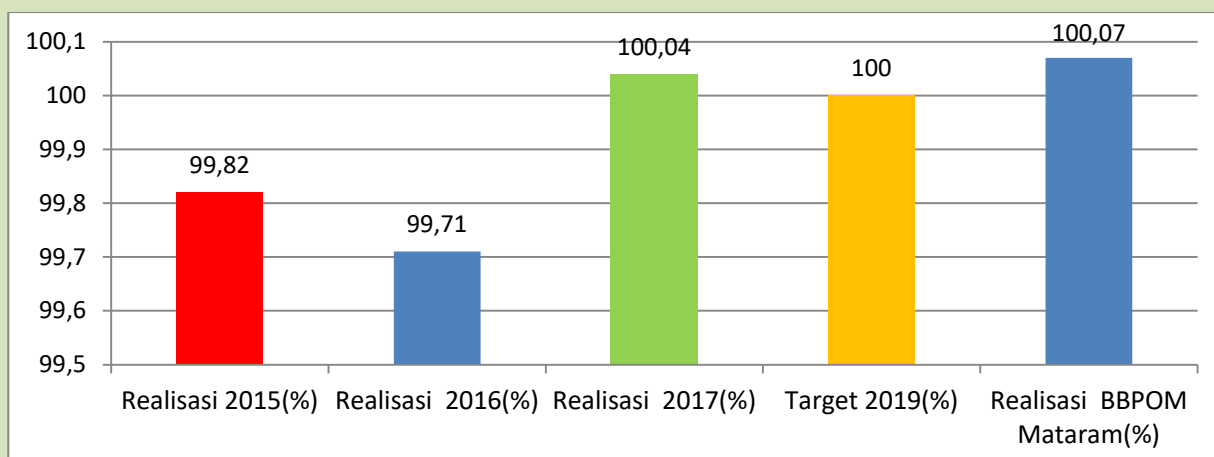
❖ Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Kualitas Sampling dan Pengujian terhadap Produk Obat dan Makanan :

Adapun indikator kegiatan dan capaiannya adalah sebagai berikut :

1) Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis :

Target thn 2017	Realisasi	Persentase Capaian	Kriteria Penilaian	Target s.d Tahun 2019	% Capaian Terhadap Target Thn 2019	Realisasi Tahun 2016	Perbandingan terhadap realisasi tahun 2016	Persentase Capaian BBPOM Mataram
2.800 sampel	2.801 sampel	100,04 %	Memuaskan	2.800 sampel	100,04 %	2.792	100,03%	100,07%

Adapun gambaran perbandingan sampel yang diuji tahun 2017 terhadap realisasi tahun-tahun sebelumnya, target 2019 dan realisasi BBPOM di Mataram adalah sebagai berikut :



Gambar 15. Grafik Perbandingan Realisasi Sampel Dengan Parameter Kritis Yang Diuji

Melalui kegiatan pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan oleh BBPOM di Banjarmasin tahun 2017, telah dilakukan sampling sebanyak 2.801 sampel yang diuji menggunakan parameter kritis di BBPOM di Banjarmasin. Adapun 15 sampel lainnya tidak diuji di BBPOM di Banjarmasin tetapi dilakukan uji rujuk dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) cangkang kapsul dikirim ke BBPOM di Mataram untuk uji DNA babi.
- 1 (satu) Produk suplemen kesehatan dikirim ke BBPOM di Mataram untuk uji DNA babi.
- 6 (sampel) produk pangan dikirim ke BBPOM di Mataram untuk uji DNA babi.
- 4 (empat) sampel rokok dikirim ke BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Semarang.
- 3 (tiga) sampel vaksin dikirim ke PPOMN.

Dari 2.801 sampel yang diuji berdasarkan parameter kritis, terdiri atas :

- a. Obat : 552 sampel
- b. Obat Tradisional : 422 sampel
- c. Kosmetik : 844 sampel
- d. Suplemen Kesehatan: 143 sampel
- e. Makanan : 840 sampel

Pada tahun 2017, ditetapkan target sebesar 2.800 sampel dan realisasi sebesar 2.801 sampel sehingga pencapaian persentase kinerja adalah 100,04%. Perbandingan capaian BBPOM di Banjarmasin tahun 2017 sebesar 100,04% sampel terhadap capaian BBPOM di Mataram sebesar 1006,07 sampel adalah 99,97%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan sumber daya manusia dan sumber daya laboratorium BBPOM di Banjarmasin tidak berbeda terlalu jauh dibandingkan dengan BBPOM Mataram. Namun demikian BBPOM Banjarmasin tetap perlu meningkatkan kemampuan dan kapastias uji sehingga lebih optimal dalam

melakukan pengujian guna mengawal produk Obat dan Makanan yang beredar di Kalimantan Selatan

Dibandingkan dengan capaian tahun 2016 (2.792 sampel), capaian tahun 2017 mengalami peningkatan. Capaian ini tidak terlepas dari semakin membaiknya penyusunan dan penetapan prioritas sampling. Penyusunan prioritas sampling dilakukan dengan melibatkan semua Balai Besar/Balai POM, sehingga prioritas sampling yang ditetapkan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan dari laboratorium yang ada di setiap Balai Besar/Balai POM. Hal ini memberi dampak positif bahwa umumnya sampel yang diterima (100,04%) dapat diuji sesuai parameter kritisnya. Namun demikian masih ada parameter kritis dari sampel tertentu yang belum bisa diuji secara lengkap. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan peralatan dan keterbatasan kompetensi penguji. Untuk itu BBPOM di Banjarmasin perlu melakukan peningkatan kemampuan uji, melalui :

- a. Pengadaan alat laboratorium sesuai dengan standar GLP yang sudah ditetapkan oleh PPOMN dan sesuai dengan tuntutan parameter kritis pada Pedoman prioritas sampling.
- b. Perluasan/penambahan ruangan agar tersedia ruangan yang memadai untuk pengadaan alat/instrumen yang belum dimiliki. Hal ini perlu dilakukan karena setiap penambahan alat utama laboratorium memerlukan ruangan yang tidak sedikit, sementara pada sisi lain luasan ruangan laboratorium tidak memungkinkan untuk menampung penambahan alat.
- c. Peningkatan kompetensi penguji, akan dilakukan melalui Bimtek, magang, *in house training* atau *in job training*, yang dilakukan berdasarkan *Training Needs Analysis*.
- d. Penajaman perencanaan terhadap prioritas sampling, agar sampling dilakukan berdasarkan skala risiko dan kemampuan uji.

Keempat hal di atas perlu menjadi prioritas agar pemenuhan kemampuan untuk melakukan pengujian terhadap Obat dan Makanan semakin membaik sehingga BBPOM di Banjarmasin mampu menguji semua parameter kritis dari setiap sampel Obat dan Makanan yang akan diuji. Pada akhirnya BBPOM di Banjarmasin dapat mencapai target yang ditetapkan sebelumnya.

2) Persentase pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik :

Target thn 2017	Realisasi Tahun 2017	Persentase Capaian	Kriteria Penilaian	Capaian 2016	Perbandingan terhadap capaian tahun 2016	Target s.d Tahun 2019	% Capaian terhadap target 2019	Persentase Capaian BBPOM Mataram
100 sampel	100 sampel	100 %	Memuaskan	119,64 %	83,58 %	100 %	100 %	100%

Alokasi sampel obat untuk diuji pada tahun 2017 adalah 560 sampel. Dalam rangka pengawalan obat di sektor publik, BBPOM di Banjarmasin mengalokasikan 100 sampel dari total 560 sampel obat dan disampling dari minimum 25% total Instalasi Farmasi

Kabupaten/Kota (IFK) dan Provinsi. Dari 100 sampel obat sektor publik ini ditargetkan semuanya (100%) dapat disampling dan diuji oleh BBPOM di Banjarmasin.

Terhadap target tersebut di atas, dapat direalisasikan sebanyak 100 sampel sehingga pencapaian terhadap target adalah 100 %. Keberhasilan ini tidak terlepas dari :

- a. Meningkatnya koordinasi dengan **stakeholders**, khususnya dengan IFK/Gudang Alokon (alat/obat kontrasepsi) yang ada di Kalimantan Selatan, sehingga memudahkan pada pengambilan sampel.
- b. Membaiknya perencanaan dan pelaksanaan sampling

Capaian BBPOM di Banjarmasin tahun 2017 sebesar 100% sama dengan capaian BBPOM di Mataram sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa baik BBPOM di Banjarmasin dan BBPOM di Mataram mampu melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Capaian yang memuaskan ini tentunya perlu dipertahankan dan sedapat mungkin diupayakan untuk ditingkatkan agar obat yang digunakan pada sektor publik senantiasa terjaga keamanan, mutu dan khasiatnya, melalui upaya-upaya :

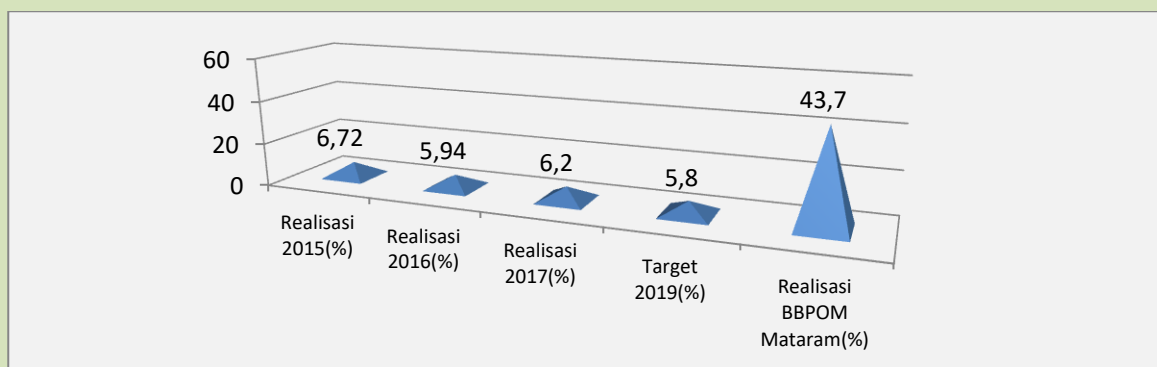
- ✓ Perkuatan koordinasi fungsional dengan stakeholders terkait agar memudahkan pada pengambilan sampel
- ✓ Pemantapan perencanaan sampling agar sampling yang dilakukan dapat diuji sesuai parameter kritis karena perencanaan disusun dengan tetap memperhatikan kemampuan laboratorium termasuk ketersediaan reagen dan baku pembanding.

❖ **Meningkatnya Kualitas Sarana Produksi yang memenuhi standar**

Indikator kegiatan dan capaiannya adalah **Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan (total sarana produksi = 1.557 termasuk IRTP)**. Adapun uraian capaiannya adalah sebagai berikut :

Target thn 2017	Realisasi Tahun 2017	Persentase Capaian	Kriteria Penilaian	Capaian 2016	Perbandingan terhadap capaian tahun 2016	Target s.d Tahun 2019	% Capaian terhadap target 2019	Persentase Capaian BBPOM Mataram
5,80 % (93 sarana)	6,20 % (96 sarana)	106,67 %	Memuaskan	5,80%	106,67%	5,80 %	106,90%	101,63%

Adapun gambaran perbandingan Sarana Produksi Yang Diawasi tahun 2017 terhadap realisasi tahun-tahun sebelumnya, target 2019 dan realisasi BBPOM di Mataram adalah sebagai berikut :



Gambar 16. Grafik Perbandingan Realisasi Sarana Produksi Yang Diawasi BBPOM di Banjarmasin

Berdasarkan data akhir tahun 2017 jumlah sarana produksi Obat dan Makanan (termasuk IRTP) di Kalimantan Selatan sebanyak 1.557 sarana. Pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2017 ditetapkan target persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan adalah sebesar 5,80% (equivalen 93 sarana). Dari target tersebut dapat direalisasikan sebanyak 96 sarana (6,20% dari total sarana yang diawasi), sehingga persentase pencapaian kinerja adalah 106,67%. Capaian pengawasan terhadap sarana produksi Obat dan Makanan sebanyak 96 sarana, sudah dapat mencakup pemeriksaan terhadap semua sarana produksi Obat dan Makanan yang ada di Kalimantan Selatan dan produknya mendapat izin edar dari Badan POM. Adapun pelaksanaan kegiatan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan adalah sebagai berikut :

NO	SARANA PRODUKSI	REALISASI JUMLAH SARANA YANG DIPERIKSA	HASIL PEMERIKSAAN	
			MK	TMK
1	Industri Farmasi	0	0	0
2	Industri OT	1	0	1
3	UKOT	5	1	4
4	Ind. Kosmetika Gol A	1	0	1
4	Ind. Kosmetika Gol B	9	0	9
5	Industri ALKES	0	0	0
6	Industri PKRT	0	0	0
7	Industri Pangan	32	21	11
8	Industri RTP	48	1	47
9	Ind. Miras	0	0	0
Total		96	23	73

Tabel 10. Rincian Sarana Produksi Yang Diperiksa

Tingginya realisasi pencapaian kinerja ini disebabkan oleh semakin membaiknya manajemen pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan BBPOM di Banjarmasin. Kondisi ini berdampak pada efisiensi pemanfaatan SDM dan anggaran yang tersedia untuk mendapatkan **output** yang semaksimal mungkin. Efisiensi dilakukan dengan penentuan target jumlah sarana produksi yang harus diperiksa pada setiap trip ditetapkan dengan memperhatikan kompleksitas dari sarana produksi yang akan diawasi, sehingga jumlah sarana yang diawasi tidak sama pada setiap tripnya.

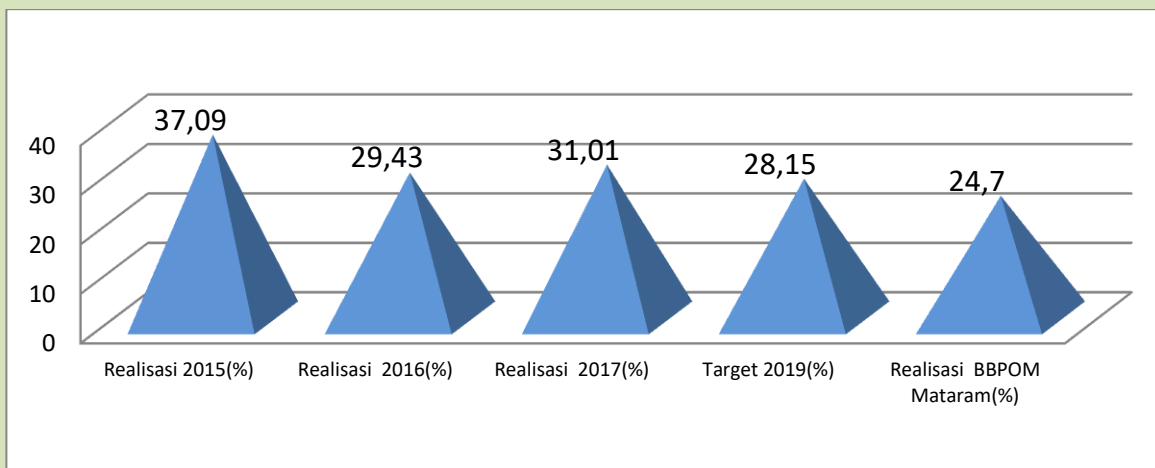
Perbandingan capaian tahun 2017 (6,20%) dengan capaian tahun 2017 (5,80%) adalah 106,90%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 5,80% terlihat bahwa target tahun 2019 dapat tercapai pada tahun 2016 dan juga tercapai pada tahun 2017. Oleh karena itu untuk meningkatkan perlindungan kepada masyarakat perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian target. Sedangkan perbandingan terhadap capaian BBPOM di Mataram (101,62%) adalah 105,19%. Walaupun capaian tahun 2017 sudah melampaui target tahun 2019 (5,8%), akan tetapi BBPOM di Banjarmasin perlu meningkatkan kinerja agar cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan dapat ditingkatkan. Untuk itu perlu peningkatan target pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan yang masih rendah cakupan pengawasan (target hanya 6,20%). Untuk melakukan peningkatan cakupan pengawasan BBPOM di Banjarmasin perlu tambahan SDM dan anggaran untuk kegiatan pengawasan. Dalam hal BBPOM di Banjarmasin belum dapat meningkatkan cakupan pengawasan, perlu dilakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait agar bersinergi dalam melakukan kegiatan pengawasan sehingga meningkatkan cakupan pengawasan.

❖ **Meningkatnya Kualitas Sarana Distribusi yang Memenuhi Standar**

Indikator kegiatan dan capaiannya adalah **Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan :**

Target thn 2017	Realisasi Tahun 2017	Persentase Capaian	Kriteria Penilaian	Capaian 2016	Perbandingan terhadap capaian tahun 2016	Target s.d Tahun 2019	% Capaian terhadap target 2019	Persentase Capaian BBPOM Mataram
28.15 %	31,01 %	110,15%	Memuaskan	28,15 %	29,43%	28.15 %	105,37%	98,80%

Adapun gambaran perbandingan Sarana Distribusi Yang Diawasi tahun 2017 terhadap realisasi tahun-tahun sebelumnya, target 2019 dan realisasi BBPOM di Mataram adalah sebagai berikut :



Gambar 17 . Grafik Perbandingan Realisasi Sarana Distribusi Yang Diawasi BBPOM di Banjarmasin

Uraian pelaksanaan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Jenis Komoditi	Sarana Yang diperiksa	Hasil Pengawasan	
		MK	TMK
Obat	302	58	188
Napza	64	51	13
Sarana distribusi OT	7	3	4
Sarana distribusi Kosmetik	40	24	16
Sarana distribusi Suplemen Kesehatan	4	3	1
Sarana distribusi Pangan	59	38	21
Sarana Bahan Berbahaya	4	1	3
TOTAL	480	178	246

Tabel 11. Rincian Sarana Distribusi yang Diperiksa



Gambar 18. Pengawasan distribusi makanan di Giant Mall

Dengan target sebesar 28,15 % dari total 2.607 sarana distribusi, persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan yang dapat direalisasikan sebesar 31,01% sehingga persentase pencapaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 110,15%. Perbandingan terhadap capaian tahun 2016 (29,43%) adalah 105,37%.

Dari data perbandingan antara tahun 2017 terhadap tahun 2016 dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan cakupan pengawasan terhadap sarana distribusi yang diawasi. Dengan keterbatasan jumlah SDM, BBPOM di Banjarmasin mampu melakukan manajemen pengawasan Obat dan Makanan yang optimum sehingga mampu melebihi target yang sudah ditetapkan.

Perbandingan capaian BBPOM di Banjarmasin sebesar 110,15% dengan capaian BBPOM di Mataram sebesar 98,80% adalah 111,49%. Capaian ini menunjukkan bahwa BBPOM di Banjarmasin sudah melakukan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan dengan baik walaupun tidak didukung oleh SDM yang mencukupi. Namun tetap perlu dilakukan peningkatan kualitas hasil pengawasan sarana distribusi sehingga masyarakat lebih terlindungi dari peredaran Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Perbandingan antara realisasi tahun 2017 sebesar 31,05% terhadap target tahun 2019 sebesar 28,15% menunjukkan bahwa perlu dilakukan evaluasi terhadap target dengan tetap mempertimbangkan laju pertumbuhan sarana distribusi Obat dan Makanan di Kalimantan Selatan. Peningkatan target cakupan perlu dilakukan agar BBPOM di Banjarmasin semakin termotivasi dalam melakukan pengawasan sehingga semakin banyak sarana distribusi yang diawasi dan pada akhirnya perlindungan terhadap masyarakat dapat ditingkatkan

❖ **Peningkatan Hasil Tindak Lanjut Penyidikan Terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan :**

Indikator kegiatan dan capaiannya adalah jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan. Dari target jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan yang ditetapkan sebanyak 9 (Sembilan) perkara, dapat direalisasikan sebanyak 11 perkara, sehingga persentase pencapaian kinerja adalah 122,22%. Uraian kasus pelanggaran bidang Obat dan Makanan yang ditemukan selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Produk	Jumlah Kasus	Tindak Lanjut	
			Non-Justitia	Pro-Justitia
1	Obat Keras	6	2	4
2	Kosmetik TIE	5	2	3
3	OT TIE	3	3	-
4	Pangan TIE	2	2	-
5	Obat TIE	2	-	2
6	Obat Keras dan OT TIE	1	1	-
7	Kosmetik TIE, Obat TIE, dan OT TIE	1	-	1
8	Obat TIE dan Obat Kadaluarsa	1	-	1
TOTAL		21	10	11

Tabel 12. Kasus Pelanggaran Bidang Obat dan Makanan Tahun 2017

Adapun nilai ekonomis berdasarkan jenis produk yang diamankan/disita sebagai barang bukti oleh BBPOM di Banjarmasin pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Komoditi	Jumlah Item Produk	Jumlah	Perkiraan Nilai Ekonomi
1	Kosmetik TIE	432 item	29981 pcs	Rp 535,844,000.00
2	Obat TIE	5 item	11602500 pcs	Rp 44,352,300,000.00
3	Obat Kadaluwarsa	1 item	318960 pcs	Rp 31,896,000.00
4	Obat Keras Daftar G	270 item	210436 pcs	Rp 158,523,600.00
Total		708 item	12161877 pcs	Rp 45,078,563,600.00

Tabel 13. Perkiraan Nilai Ekonomi Produk yang Disita sebagai Barang Bukti

Keberhasilan ini ditunjang oleh :

- a. Membaiknya kinerja Seksi Penyidikan dalam menemukan tindak pidana bidang Obat dan Makanan serta melakukan tindak lanjut sesuai SOP.
- b. Membaiknya koordinasi dengan *stakeholders*. Keberhasilan menemukan pelaku tindak pidana dan melakukan pemberkasan untuk tindakan hukum “**Pro Justitia**” tidak terlepas dari dukungan para *stakeholder*, mulai dari Polri selaku Korwas PPNS, Kejaksaan selaku penuntut umum dan Kehakiman yang akan menyidangkan perkara. Salah satu dampak positif dari perkuatan koordinasi lintas sektor mencapai puncaknya pada saat ditemukan tindak pidana pendistribusian obat illegal pada saat kegiatan operasi gabungan nasional antara PPNS Badan POM dengan Tim khusus Poltabes Kota Banjarmasin dengan temuan obat yang disalahgunakan seperti carnophen, tramadol, trihexyphenidyl sebanyak 11.717.560 butir dengan nilai ekonomi sebesar Rp.43.664.696.000,-. Temuan ini merupakan salah satu pengungkapan kasus dengan nilai ekonomi terbesar di lingkup Badan POM.
- c. Membaiknya dukungan manajemen dan tersedianya sarana-prasarana yang memadai untuk melakukan penyidikan perkara di bidang Obat dan Makanan.

Keberhasilan tersebut di atas perlu dipertahankan dan diupayakan untuk ditingkatkan agar target tahun 2019 sebesar minimal 9 perkara senantiasa tercapai. Selain itu melalui peningkatan tindakan “**Pro Justitia**” akan menimbulkan efek jera kepada pelaku tindak pidana bidang Obat dan Makanan sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha.



Gambar 19. Penghargaan dari Kepala Badan POM terkait tindak pidana di bidang pemberantasan obat tanpa ijin edar dan kadaluarsa

Indikator kegiatan dan capaiannya adalah jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan. Adapun target dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Target thn 2017	Realisasi Tahun 2017	Persentase Capaian	Kriteria Penilaian	Capaian 2016	Perbandingan terhadap capaian tahun 2016	Target s.d Tahun 2019	Persentase Capaian terhadap target 2019	Persentase Capaian BBPOM Mataram
9	11	122,22%	Memuaskan	9	122,22%	9	122,22%	112,50

Perbandingan capaian BBPOM di Banjarmasin tahun 2017 (11 perkara) terhadap capaian BBPOM di Mataram (9 perkara) adalah sebesar 122,22. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBPOM di Banjarmasin sangat menggembirakan. Keberhasilan ini perlu dipertahankan dan diupayakan untuk ditingkatkan agar target tahun 2019 sebesar 9 perkara senantiasa tercapai. Selain itu melalui peningkatan tindakan “**Pro Justitia**” akan menimbulkan efek jera kepada pelaku tindak pidana bidang Obat dan Makanan sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha.



Gambar 20. Barang bukti obat penyalahgunaan obat di Kalimantan Selatan dan Peninjauan Barang Bukti Oleh Kepala Badan POM dan Kapolda Kalsel

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja PPNS BBPOM di Banjarmasin antara lain adalah sebagai berikut :

- ✓ Terus memperkuat kemitraan dengan **stakeholders** strategis, misalnya Penyidik Polri selaku Korwas PPNS, Jaksa selaku penuntut umum dan **stakeholders** lainnya agar semua bersinergi dalam memberdayakan PPNS BBPOM di Banjarmasin, sehingga semakin banyak kasus pidana yang dapat ditindaklanjuti secara **Pro Justitia**, tentunya dengan tetap memperhatikan tingkat pelanggaran yang ditemukan.
- ✓ Peningkatan kapasitas PPNS BBPOM di Banjarmasin melalui **in job training, coaching clinic** atau training lainnya agar pengawasan yang dilakukan semakin tajam dan pada akhirnya cakap dalam mengungkap setiap tindak pidana bidang Obat dan Makanan serta dapat melakukan percepatan penyelesaian berkas perkara.
- ✓ Menggalang dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat dan SKPD lainnya. Hal ini menjadi sangat penting karena rentang kendali pengawasan yang sangat luas sehingga informasi dari masyarakat dan dukungan SKPD sangat besar peranannya.

B. Sasaran Strategis 2 : “Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat”

Pencapaian Sasaran Strategis ini dilakukan dengan pengukuran capaian indikator kinerja berikut ini :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Persentase Capaian	Kriteria Capaian	NPS
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	1 Tingkat Kepuasan Masyarakat *)	83	83,23	100,28 %	Baik	100,28 % (Memuaskan)
	2 Jumlah Kab/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	11	11	100,00 %	Baik	

*) Indikator Kinerja Utama

Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 BBPOM di Banjarmasin

Adapun uraian capaian kedua indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Kepuasan Masyarakat :

Target thn 2017	Realisasi Tahun 2017	Persentase Capaian	Kriteria Penilaian	Capaian 2016	Perbandingan terhadap capaian tahun 2016	Target s.d Tahun 2019	% Capaian terhadap target 2019	Realisasi BBPOM Mataram
83 %	83,23 %	100,28	Memuaskan	82,1%	101,38	85,00 %	96,59%	118,97

Pengumpulan data Survei Indeks Kepuasan Pelanggan (IKM) pada BBPOM di Banjarmasin bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja unit pelayanan secara berkala dan juga sebagai bahan evaluasi untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Indeks kepuasan masyarakat dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang bersangkutan.

Realisasi untuk indikator ini adalah 83,20% (target 83%), sehingga persentase pencapaian kinerja adalah 100%, dengan kriteria penilaian **Memuaskan**. Pada dasarnya realisasi atas indikator ini menunjukkan hal yang menggembirakan, karena BBPOM di Banjarmasin dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada sebagian besar (81%) masyarakat. Capaian ini sejalan dengan penerapan Quality Management System (QMS) yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan.

Tingginya tingkat kepuasan masyarakat ini tidak terlepas dari peningkatan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat, yaitu :

a. Kemudahan akses

Masyarakat diberi kemudahan untuk melakukan akses ke BBPOM di Banjarmasin melalui :

- Penyediaan ruang khusus untuk ULPK yang memadai
- Pada berbagai kesempatan, baik tatap muka langsung maupun melalui media massa dilakukan sosialisasi tentang nomor telpon, fax, email serta sarana lainnya yang dapat digunakan bila masyarakat ingin berkonsultasi/mendapatkan pelayanan terkait informasi Obat dan Makanan dari BBPOM di Banjarmasin.

b. Peningkatan sarana dan kualitas layanan kepada masyarakat, berupa :

- Penyediaan computer yang dilengkapi dengan jaringan internet pada ruang tunggu dan ruang ULPK, yang dapat digunakan secara mandiri oleh masyarakat.
- Penyediaan monitor layar sentuh di area pelayanan sampel pihak ketiga yang memudahkan untuk mengakses jenis parameter uji dan biaya uji pengujian sampel pihak ketiga.
- Pendampingan/bimbingan kepada UKM bidang produksi/distribusi Obat dan Makanan dalam mengurus izin/sertifikasi.

c. Penerapan standarisasi persyaratan yang bersifat transparan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.

d. Peningkatan kompetensi petugas dalam memberikan layanan kepada masyarakat, yang dilakukan melalui berbagai pelatihan.

Perbandingan capaian BBPOM di Banjarmasin (100,28%) dengan capaian BBPOM di Mataram (118,97%) adalah 84,29%. Ini menunjukkan bahwa BBPOM di Banjarmasin perlu berupaya dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Bila dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 85%, BBPOM di Banjarmasin perlu terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat agar semua/semakin banyak pelanggan/masyarakat merasakan manfaat, kemudahan dan kenyamanan atas layanan yang diberikan sehingga pada akhirnya meningkatkan kepuasan masyarakat.

Realisasi tahun 2017 sebesar 83,20%, bila dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 85%, BBPOM di Banjarmasin perlu terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat agar semakin banyak pelanggan/masyarakat merasakan manfaat, kemudahan dan kenyamanan atas layanan yang diberikan sehingga pada akhirnya meningkatkan kepuasan masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan kepuasan pelanggan atas layanan yang diberikan oleh BBPOM di Banjarmasin, akan dilakukan dengan skala prioritas. Hal yang pertama ditingkatkan

adalah unsur kedisiplinan petugas pelayanan. Masyarakat menilai kurang atas unsur ini karena kadang-kadang ada kekosongan petugas di ruang pelayanan pada jam kerja. Kekosongan petugas jaga ini terjadi karena bertepatan pada saat ada masyarakat/konsumen yang datang ke ULPK, semua staf Bidang Serlik yang bertugas memberi layanan langsung kepada masyarakat melaksanakan tugas lain, sehingga menimbulkan kesan seolah-olah petugas sengaja meninggalkan ruang pelayanan. Mengatasi keterbatasan SDM, akan diatasi dengan :

- ✓ Membuat jadwal petugas jaga, dengan penggarisan bahwa petugas jaga sedapat mungkin dibebaskan dari tugas lain bila sedang bertugas.
- ✓ Memperbaiki perencanaan pelaksanaan kegiatan agar Bidang Serlik bisa membagi tenaga yang ada sehingga selalu tersedia petugas pada Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK).
- ✓ Memperkuat koordinasi dengan SKPD agar sejak awal permintaan narasumber kepada BBPOM di Banjarmasin dapat diidentifikasi, selanjutnya disinkronkan dengan kegiatan BBPOM di Banjarmasin.



Gambar 21. Penghargaan Stand Terbaik Untuk BBPOM Banjarmasin Pada Kalsel Expo 2017

Terlepas dari hasil penilaian kuesioner kepuasan pelanggan dengan nilai capaian 83,23%, petugas BBPOM di Banjarmasin dinilai sangat memuaskan dalam memberikan pelayanan informasi pada pameran di Kalsel Expo 2017. Stand BBPOM di Banjarmasin mendapatkan penghargaan sebagai Juara 1 Stand terbaik kategori instansi vertikal. Pada kesempatan berikutnya, masyarakat mengharapkan informasi efek samping obat, keamanan pangan, cara mengenali jamu/ kosmetik ilegal serta informasi lain yang terbaru.

2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan

Target thn 2017	Realisasi Tahun 2017	Persentase Capaian	Kriteria Penilaian	Capaian 2016	Perbandingan terhadap capaian tahun 2016	Target s.d Tahun 2019	% Capaian terhadap target 2019
11	11	100,00 %	Baik	10	110%	13	84,62 %

Dari 13 kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Selatan, pada tahun 2017 BBPOM di Banjarmasin menetapkan target 11 (sebelas) kabupaten/kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan. Dari target tersebut dapat direalisasikan 11 kabupaten/kota, sehingga persentase pencapaian kinerja adalah sebesar 100% dan mendapat nilai **Baik**.

Adapun Kabupaten/Kota yang dimaksud adalah :

1. Kota Banjarmasin
2. Kota Banjarbaru
3. Kabupaten Banjar
4. Kabupaten Tabalong
5. Kabupaten Hulu Sungai Utara
6. Kabupaten Hulu Sungai Selatan
7. Kabupaten Hulu Sungai Tengah
8. Kabupaten Kotabaru
9. Kabupaten Tanah Bumbu
10. Kabupaten Barito Kuala
11. Kabupaten Tapin

Keberhasilan pencapaian target ini tentunya tidak terlepas dari keberhasilan advokasi/koordinasi yang dilakukan oleh BBPOM di Banjarmasin kepada pemerintah kabupaten/kota. Hal yang perlu diperhatikan oleh BBPOM di Banjarmasin adalah senantiasa melakukan advokasi dan koordinasi kepada pemerintah kabupaten/kota agar anggaran yang dialokasikan tersebut dapat diimplementasikan dengan optimal, sehingga berdampak pada meningkatnya persentase Obat dan Makanan yang memenuhi syarat.

Bila dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 13 kabupaten/kota, menunjukkan bahwa BBPOM di Banjarmasin perlu lebih proaktif melakukan advokasi agar

semua kabupaten/kota di Kalimantan Selatan (sesuai target tahun 2019 = 13) dapat mengalokasikan anggaran yang memadai untuk melakukan pengawasan, pembinaan sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan serta KIE kepada masyarakat tentang keamanan, mutu dan khasiat/manfaat Obat dan Makanan.

Advokasi yang akan dilakukan oleh BBPOM di Banjarmasin, lebih dititik-beratkan terhadap kabupaten/kota yang belum menunjukkan komitmen untuk mengalokasikan anggaran. Hal ini perlu dilakukan agar target tahun 2019 dapat tercapai dengan baik.

❖ **Meningkatnya Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)**

Indikator kegiatannya adalah : 1) Jumlah layanan publik dan 2) Jumlah komunitas yang diberdayakan, dengan capaian sebagai berikut :

1) **Jumlah layanan publik.**

Target thn 2017	Realisasi	Persentase Capaian	Target s.d Tahun 2019	Persentase Capaian terhadap target Thn 2019	Realisasi Tahun 2016	Persentase Capaian terhadap Realisasi tahun 2016
1.025 layanan	1229 layanan	119,90%	1.100 layanan	111,73%	2.490 layanan	49,36%

Layanan publik yang dilakukan pada tahun 2017 berupa :

- a. KIE langsung kepada perorangan/kelompok
- b. Pelayanan melalui ULPK
- c. Pengujian sampel pihak ke-3, termasuk sampel barang bukti penyalahgunaan Narkotika.
- d. Pelayanan Surat Keterangan Impor (SKI).

Pada tahun 2017 jumlah layanan publik ditargetkan sebesar 1.025 layanan dan realisasi sebesar 1.229 layanan, persentase capaian adalah 111,73%. Realisasi layanan publik pada tahun 2017 yang memenuhi target disebabkan oleh :

- a. Gencarnya pemberantasan penyalahgunaan narkoba oleh pihak berwenang, sehingga pengujian barang bukti yang dilakukan melalui BBPOM di Banjarmasin juga semakin tinggi.
- b. Meningkatnya permintaan pengujian Obat dan Makanan dari *stakeholder*.
- c. Meningkatnya jumlah permintaan audit sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan di Kalimantan Selatan.
- d. Meningkatnya pengakuan masyarakat Kalimantan Selatan terhadap BBPOM di Banjarmasin sebagai sumber informasi tentang Obat dan Makanan.
- e. Inovasi BBPOM di Banjarmasin untuk melakukan layanan pengaduan konsumen melalui kegiatan pameran yang diadakan oleh Pemprov Kalsel dan Kab/Kota.

Capaian tahun 2017 sebesar 1.229 layanan, dibandingkan target 2019 sebesar 1.100 layanan, menunjukkan bahwa perlu dilakukan evaluasi penetapan target karena target tahun 2019 sudah tercapai dari tahun 2016.

2) Jumlah Komunitas yang diberdayakan (di luar pengawalan PJAS, FSMD, dan Pasar Aman) :

Target thn 2017	Realisasi	Persentase Capaian	Target s.d Tahun 2019	Persentase Capaian terhadap target Thn 2019	Realisasi Tahun 2016	Persentase Capaian terhadap Realisasi tahun 2016
26	26	100 %	34	76,47%	22	118,19%

T

Pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 26 komunitas dan dapat dicapai sebanyak 26 komunitas sehingga pencapaian kinerja ini adalah sebesar 100%. Penetapan target sebesar 22 komunitas didasarkan atas perhitungan bahwa :

- ✓ Jumlah komunitas yang diintervensi sampai tahun 2017 adalah 26 komunitas
- ✓ Intervensi baru pada tahun 2017 terhadap komunitas pasar adalah 1 komunitas
- ✓ Intervensi baru pada tahun 2017 terhadap komunitas desa adalah 3 komunitas desa
- ✓ Adapun komunitas sekolah yang diintervensi tentang keamanan PJAS, tidak diperhitungkan karena merupakan pengawalan AN-PJAS. Demikian halnya dengan komunitas pasar yang diintervensi melalui program pasar aman dari bahan berbahaya, juga tidak diperhitungkan sebagai cakupan kinerja karena merupakan pengawalan terhadap intervensi yang dilakukan pada tahun sebelumnya.

Pencapaian kinerja ini dapat direalisasikan sesuai target karena penetapan target dan pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan baik dengan tetap memperhatikan sumber daya yang dapat dimanfaatkan.



Gambar 22. Kegiatan penyuluhan atau Bimtek Komunitas Desa

Dalam upaya mencapai target tahun 2019 sebesar 34 komunitas, BBPOM di Banjarmasin perlu secara konsisten mengoptimalkan kinerja agar komunitas yang diberdayakan dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan. Dalam upaya efisiensi dan efektifitas kegiatan pemberdayaan komunitas, BBPOM di Banjarmasin perlu memperkuat kemitraan dengan *stakeholders* agar bersinergi dalam memberdayakan komunitas/masyarakat.

C. Sasaran Strategis 3 : “Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan Badan POM”

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase Capaian	Kriteria Capaian	Target Thn 2019	Capaian Thn 2016
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BBPOM di Banjarmasin	Nilai SAKIP BBPOM Banjarmasin dari Badan POM	A (81)	BB (72,26)	89,21%	Cukup	A	BB (71,23)

Tabel 15. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 BBPOM di Banjarmasin

Indikator untuk sasaran ini adalah Nilai SAKIP BBPOM di Banjarmasin dari Badan POM. Adapun target yang ditetapkan untuk tahun 2017 adalah SAKIP BBPOM di Banjarmasin mendapat nilai A dari Badan POM. Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan oleh Badan POM diketahui bahwa SAKIP BBPOM di Banjarmasin mendapat nilai BB (72,26), maka persentase capaian terhadap target ini adalah 89,21% dengan kriteria penilaian **cukup**. Capaian ini tetap merupakan prestasi bagi BBPOM di Banjarmasin karena mengalami kenaikan dibanding tahun 2016 sebesar 1,03 poin.

Hal – hal yang mendukung naiknya nilai SAKIP antara lain :

- Penggunaan aplikasi *e-performance* untuk meng-input data kinerja setiap triwulan, sehingga terlihat zona capaian setiap sasaran strategis kemudian dilakukan evaluasi bersama yang dituangkan dalam evaluasi triwulan
- Konsistensi penerapan sistem mutu sesuai ISO 9001:2015 ditandai dengan keberhasilan BBPOM di Banjarmasin memperbarui sertifikat ISO 9001:2008 menjadi sertifikat ISO 9001:2015 melalui audit resertifikasi oleh TUV SUD pada tahun 2017. Keberhasilan mempertahankan akreditasi sistem mutu ISO 1705 : 2005 untuk lingkup laboratorium.

Keberhasilan pencapaian kinerja untuk indikator ini tentunya perlu diupayakan untuk ditingkatkan yang diikuti dengan penyusunan laporan yang baik sehingga pada akhirnya dapat memperoleh nilai A dari Badan POM karena target tahun 2016 s.d tahun 2019 adalah SAKIP BBPOM di Banjarmasin mendapat nilai A dari Badan POM. Dalam upaya mendapatkan nilai A

terhadap penilaian SAKIP oleh Badan POM, BPOM di Banjarmasin perlu melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Konsisten melakukan perbaikan kinerja sehingga lebih efisien dan lebih efektif dalam melakukan pengawasan guna melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Agar pengawasan berjalan efisien dan efektif perlu dilakukan skala prioritas. Pengawasan yang dilakukan perlu ditindaklanjuti dengan **low enforcement** sesuai tingkat kesalahan/pelanggaran. Untuk optimalisasi pelaksanaan pengawasan, perlu didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana serta jumlah dan kualitas SDM yang memadai.
3. Menyusun SKP secara *cascading* dari eselon 2, eselon 3, eselon 4 hingga ke individu
4. Memanfaatkan sistem pengukuran kinerja berbasis IT yang dapat mengolah data *input* dari individu hingga dapat menampilkan capaian kinerja sasaran strategis BPOM di Banjarmasin
5. Pembinaan secara intensif dan berkelanjutan kepada pelaku usaha dan KIE kepada masyarakat.
6. Memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.
7. Melaksanakan RB secara konsisten. Melalui RB BPOM di Banjarmasin dapat melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan secara efisien dan efektif serta dapat memberikan layanan prima kepada masyarakat dan **stakeholders** lainnya. Pada akhirnya masyarakat akan merasakan kehadiran Negara dalam melindungi kepentingan masyarakat serta puas dengan layanan yang diberikan oleh ASN BPOM di Banjarmasin.

❖ **Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan :**

Pemenuhan sarana prasarana sesuai standar pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 70% dan dapat direalisasikan sebesar 69,30%. Oleh karena itu pencapaian kinerja terhadap indikator ini adalah 100%. Penetapan target sebesar 70% dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut :

- a. Keterbatasan anggaran
- b. Keterbatasan anggaran menyebabkan pengadaan sarana prasarana dilakukan secara selektif berdasarkan skala prioritas.
- c. Keterbatasan ruangan
- d. Keterbatasan ruangan berdampak pada kesulitan pengadaan peralatan, karena setiap peralatan membutuhkan ruangan yang memadai. Untuk mengatasi keterbatasan ruangan ini pada tahun 2018, BPOM di Banjarmasin merencanakan untuk melakukan relokasi kantor dan laboratorium dengan memanfaatkan lahan yang dihibahkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Indikator kegiatan dan capaiannya adalah persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar, dengan uraian pencapaiannya sebagai berikut :

Target thn 2017	Realisasi	Persentase Capaian	Target s.d Tahun 2019	Persentase Capaian terhadap Target Thn 2019	Capaian Thn 2016	Perbandingan Capaian terhadap Capaian Thn 2016
70%	69,30%	99%	80%	86,63%	62%	111,77%

Capaian tahun 2017 sebesar 69,30%, dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 80%, menunjukkan bahwa BBPOM di Banjarmasin perlu berupaya dengan semaksimal mungkin untuk meningkatkan sarana prasarana sesuai standar. Upaya yang akan dilakukan, antara lain adalah :

- a. Melakukan koordinasi dan konsultasi intensif dengan Badan POM dan pihak terkait lainnya. Hal ini perlu dilakukan karena upaya perluasan ruang laboratorium direncanakan akan dilakukan melalui pembangunan gedung baru dengan memanfaatkan tanah hibah dari Pemprov Kalsel. Rencana ini tentunya hanya dapat berjalan dengan baik bila mendapat dukungan dari Badan POM dan pihak terkait lainnya. Untuk itu BBPOM di Banjarmasin perlu meningkatkan koordinasi/konsultasi agar mendapat dukungan yang diharapkan.
- b. Melaksanakan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan secara efisien agar terdapat anggaran yang memadai, yang dapat dialokasikan untuk pengadaan sarana-prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan. Efisiensi dapat dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan berdasarkan skala prioritas dan memiliki daya ungkit yang tinggi terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan oleh BBPOM di Banjarmasin.
- c. Mengoptimalkan kemitraan dengan *stakeholders*. Melalui kemitraan dengan stakeholders dapat mewujudkan *sharing* pembiayaan terhadap berbagai kegiatan, khususnya kegiatan dalam rangka pembinaan pelaku usaha dan KIE kepada masyarakat. Pada akhirnya alokasi anggaran pada BBPOM di Banjarmasin dapat lebih difokuskan pada pengadaan sarana-prasarana dan anggaran/biaya langsung untuk melaksanakan kegiatan pengawasan.

❖ **Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang Dilaporkan Tepat Waktu.**

Indikator kegiatannya adalah **Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu**, dengan uraian pencapaian sebagai berikut :

Target thn 2017	Realisasi	Persentase Capaian	Target s.d Tahun 2019	Persentase Capaian terhadap Target Thn 2019	Capaian Thn 2016	Perbandingan Capaian terhadap Capaian Thn 2015
10 dokumen	10 dokumen	100%	10 dokumen	100%	9 dokumen	111,11%

Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan secara optimal, pada tahun 2017 BBPOM di Banjarmasin menetapkan target dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu sebanyak 10 dokumen. Atas target tersebut dapat direalisasikan 100%.

Hasil yang memuaskan ini tidak terlepas dari meningkatnya sistem pendokumentasian dan pelaporan atas perencanaan serta money yang dilakukan. Peningkatan tersebut antara lain berupa :

- Kelancaran arus data antar bidang/sub bagian,
- Pemanfaatan aplikasi pencatatan dan pelaporan secara elektronik,
- Komitmen pimpinan untuk mendorong terlaksananya pelaporan tepat waktu.

Ketiga hal di atas saling berkaitan dan bersinergi untuk mencapai target kegiatan ini. Melalui ketersediaan data, akan memudahkan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi dengan baik, sehingga pada akhirnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi dapat disusun dengan baik dan diserahkan/dilaporkan tepat waktu.

Capaian tahun 2017 sebesar 10 dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 10 dokumen, menunjukkan bahwa BBPOM di Banjarmasin harus dapat mempertahankan kinerja yang telah dicapai saat ini agar target tahun 2019 tetap dapat dipertahankan. Saat ini belum perlu dilakukan penyesuaian target karena kenyataannya belum ada penambahan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang harus disampaikan ke Badan POM atau instansi lainnya. Dalam hal dikemudian hari ada penambahan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi, BBPOM di Banjarmasin perlu melakukan penyesuaian target.

3.2. Efisiensi Kegiatan

Pengukuran efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar dari target.

Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan Indeks Efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE), sesuai dengan rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan untuk mengetahui Standar Efisiensi (SE) yang dapat digunakan sebagai angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi, dapat diperoleh dengan membandingkan % rencana capaian output terhadap % rencana capaian input dengan nilai SE = 1, sesuai rumus berikut :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Pencapaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = \frac{100 \%}{100 \%} = 1$$

Untuk mengetahui efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE sebagai berikut :

Jika IE sama/lebih besar SE, maka kegiatan tersebut dianggap efisien

Jika IE lebih kecil SE, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Selanjutnya masing-masing kegiatan diukur Tingkat Efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Dari perhitungan tingkat efisiensi sebagaimana terdapat pada lampiran, disimpulkan bahwa BBPOM di Banjarmasin dapat melaksanakan kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan dengan efisien. Hal ini terlihat dari perhitungan Indeks Efisiensi (IE) yang semuanya mendapat nilai lebih besar dari 1. Adapun nilai TE bervariasi dari 0,01 sampai dengan 0,55. Keberhasilan melaksanakan kegiatan secara efisien ini merupakan hal penting dipertimbangkan untuk meningkatkan kinerja tahun-tahun mendatang. Peningkatan kinerja mutlak dilakukan agar perlindungan kepada masyarakat juga semakin optimal.

Untuk menghasilkan *output/outcome* yang meningkat secara signifikan, efisiensi penggunaan anggaran yang telah dicapai hendaknya diikuti dengan perencanaan pengalokasian anggaran pada masing-masing kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan riil dari masing-masing kegiatan tersebut.

3.3 Realisasi Anggaran

Adapun realisasi anggaran untuk masing-masing sasaran strategis adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	5.341.349.000	5.031.693.932	94,20
2.	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	2.402.947.000	2.265.623.685	94,29
3.	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	16.343.428.000	15.255.785.135	93,35
Total		24.087.824.000	22.553.101.932	93,63

Tabel 16. Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2017

Realisasi penggunaan anggaran BBPOM di Banjarmasin pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 22.553.101.932,- atau 93,63% dari pagu anggaran sebesar Rp. 24.087.824.000,-. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2016 serapan anggaran adalah sebesar 88,70%, terlihat bahwa terdapat peningkatan persentase serapan anggaran. Peningkatan serapan anggaran ini dipengaruhi oleh :

- Berpedoman pada evaluasi serapan anggaran tahun sebelumnya, penyusunan anggaran tahun 2017 dilakukan dengan lebih baik.
- Komitmen manajemen untuk mendorong serapan anggaran seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan efisiensi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

BBPOM di Banjarmasin perlu melakukan evaluasi terhadap pengalokasian anggaran untuk masing-masing kegiatan. Pengalokasian anggaran untuk masing-masing kegiatan lebih disesuaikan lagi dengan kebutuhan riil. Bila terdapat sisa anggaran, dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya. Program/kegiatan yang masih perlu penambahan pengalokasian anggaran adalah kegiatan yang terkait dengan penyediaan sarana prasana yang sesuai standar. Hal ini perlu dilakukan karena sampai pada akhir tahun 2017, ketersediaan sarana prasarana yang sesuai standar, baru mencapai 69,30%.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- ✓ Untuk mencapai tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam renstra BBPOM di Banjarmasin 2015 - 2019, telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis. Pada tahun 2017 terdapat 2 Sasaran Strategis yang pencapaiannya **Memuaskan**, yaitu Sasaran Strategis Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan dan Sasaran Strategis Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Masyarakat. Sedang Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM tercapai dengan nilai Cukup.
- ✓ Belum berhasilnya mencapai terhadap Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BBPOM di Banjarmasin karena nilai SAKIP terhadap laporan kinerja tahun 2016 belum mendapat nilai A, dimana nilai yang diperoleh adalah BB. Untuk itu kedepan BBPOM di Banjarmasin perlu mendorong kegiatan guna mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2017.
- ✓ Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis sudah mencapai 100%, namun masih ada beberapa parameter uji kritis non wajib yang belum bisa dikerjakan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sarana prasarana dan kemampuan untuk menguji semua parameter kritis dari setiap sampel yang diterima, sehingga terdapat sampel yang harus diuji rujuk.
- ✓ Pagu anggaran BBPOM di Banjarmasin tahun 2017 adalah sebesar Rp. 24.087.824.000,-. Realisasi penggunaan anggaran BBPOM di Banjarmasin pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 22.553.101.932,- atau 93,63% dari Pagu anggaran.
- ✓ Hasil pengukuran tingkat efisiensi, menunjukkan bahwa BBPOM di Banjarmasin dapat melaksanakan kegiatan secara efisien. Kegiatan yang paling tinggi tingkat efisiennya adalah pelaksanaan kegiatan konsultasi penyelesaian berkas perkara dalam kota dengan tingkat efisiensi sebesar 0,55.
- ✓ Sepanjang tahun 2017, pencapaian yang menjadi milestone adalah memperoleh Sertifikat ISO 9001:2015 dan mempertahankan sertifikat ISO 17025:2005.

4.2 Saran

Sekaitan dengan kesimpulan tersebut di atas, berikut ini disampaikan saran-saran, yaitu :

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BBPOM di Banjarmasin, ke depan BBPOM di Banjarmasin perlu melakukan terobosan guna peningkatan kinerja, intensifikasi monitoring pencapaian kegiatan dan diikuti dengan pelaporan yang baik agar bisa mendapat nilai A atas SAKIP tahun berikutnya.
2. Dalam upaya meningkatkan kemampuan uji, perlu dilakukan peningkatan sarana prasarana pengujian serta kompetensi tenaga penguji.
3. Dalam upaya meningkatkan pengawasan obat di sektor publik, perlu peningkatan koordinasi dengan *stakeholders* agar target dapat tercapai dan masyarakat pengguna obat publik terlindungi dari produk yang tidak memenuhi syarat.
4. BBPOM di Banjarmasin perlu melakukan evaluasi terhadap pengalokasian anggaran untuk masing-masing kegiatan. Pengalokasian anggaran untuk masing-masing kegiatan dilakukan sesuai kebutuhan riil agar mengurangi sisa anggaran yang tidak terserap.

Lampiran 1. Formulir Renstra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2015-2019

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASE LINE	TARGET					Ket	
				2015	2016	2017	2018	2019		
Meningkatnya Jaminan Produk Obat dan Makanan aman	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92,00	92,00	92,50	93,00	93,50	94,00	
		2.	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	55,13	60,00	61,00	62,00	63,00	64,00	
		3.	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	88,00	89,00	90,00	91,00	92,00	93,00	
		4.	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	78,00	79,00	80,00	81,00	82,00	83,00	
		5.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	73,65	75,00	75,50	76,00	76,50	77,00	
Meningkatnya Daya Saing Obat dan Makanan di Pasar Lokal dan Global dengan Menjamin Mutu dan Inovasi	Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Masyarakat	1.	Tingkat Kepuasan Masyarakat	80	81	82	83	84	85	
		2.	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	8	9	10	11	12	13	
	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BBPOM	1.	Nilai SAKIP BBPOM dari Badan POM	CC	B	A	A	A	A	

NO	INDIKATOR KINERJA	BASELINE	TARGET					Ket		
			2015	2016	2017	2018	2019			
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan										
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2800	Sampel	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	
		2. Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100	Persen	100	100	100	100	100	
2	Meningkatnya kualitas saranaproduksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	5.80	Persen	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standard	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	28.2	Persen	28.15	28.15	28.15	28.15	28.15	
4	Meningkatnya hasil tindaklanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan	8	Perkara	8	8	9	9	9	
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat										
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	1. Jumlah layanan publik BB/BPOM	950	Layanan	975	1,000	1,025	1,050	1,100	
		2. Jumlah komunitas yang diberdayakan	14	Desa	18	22	26	30	34	
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai BPOM										
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	56.5	Persen	60.00	62.00	70.00	75.00	80.00	
2	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	8	Dokumen	10	9	10	9	10	

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahunan BBPOM di Banjarmasin Tahun 2017



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN
Jl. Brigjend. H. Hason Basri No. 40 Banjarmasin 70124
Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671
Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dra. Mahdalena, Apt., M.Si.**
Jabatan : Plt. Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P**
Jabatan : Kepala Badan POM
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarmasin, 6 Januari 2017

Kepala Badan POM	Plt. Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin
 Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P NIP. 19631109 199003 2 001	 Dra. Mahdalena, Apt., M.Si. NIP. 19620527 198903 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN**

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,00
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	62,00
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	91,00
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	81,00
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	76,00
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	83,00
		Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	11
3	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP dari BPOM	A
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2,800
		Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	5,80
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standard	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	28,15
4	Meningkatnya hasil tindakan lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan	9

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat			
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik BB/BPOM	1.025
		Jumlah komunitas yang diberdayakan	26
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BBPOM di Banjarmasin			
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	70
2	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10

Kegiatan

Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Banjarmasin

(Dua puluh lima milyar tiga ratus lima belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Anggaran

Rp. 25.315.576.000,-

Kepala Badan POM

Banjarmasin, 6 Januari 2017
Plt. Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin



Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P
NIP. 19631109 199003 2 001

Dra. Mahdalena, Apt., M.Si.
NIP. 19620527 198903 2 001

Lampiran 3. Penetapan IKU BBPOM di Banjarmasin Tahun 2015-2019



KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN
NOMOR : HK.01.02.100.04.15.0632
Tentang
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN
TAHUN 2015 – 2019

KEPALA BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU) pada Balai Besar POM di Banjarmasin;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a maka perlu ditetapkan keputusan mengenai penetapan indikator kinerja utama (IKU) Balai Besar POM di Banjarmasin.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan ke tujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
4. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015 – 2019.
9. Keputusan Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin Nomor HK.01.02.100.04.15.0622 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015 – 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN TAHUN 2015 – 2019**
- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Balai Besar POM di Banjarmasin untuk menetapkan Rencana Strategis (RS), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), menyusun dokumen penetapan kinerja (PK), menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2015 – 2019;

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brig. Jend H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70123 Telp.(0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671, 3302162, 3308046 E-mail : bbpom_banjarmasin@yahoo.com

- Kedua : Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar POM di Banjarmasin serta penetapan RS, RKT, RKA dan PK merupakan acuan bagi penyusunan dokumen sesuai SAKIP Balai Besar POM di Banjarmasin;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk periode Renstra 2015 – 2019.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 20 April 2015

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Banjarmasin



Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.Epid.
NIP. 19660909 199303 2 002

Tembusan :

1. Kepala Badan POM RI
2. Sekretaris Utama Badan POM RI
3. Inspektur Badan POM RI
4. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM RI

Lampiran
Surat Keputusan Kepala Balai Besar POM
di Banjarmasin
Nomor : HK.01.02.100.04.15.0632
Tanggal : 20 April 2015

1. Nama Unit Organisasi : BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN
2. Tugas : Melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapeutic, narkotik, psicotropik, dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplimen, keamanan pangan dan bahan berbahaya.
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan.
 - b. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapeutic, narkotik, psicotropik dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplimen, pangan dan bahan berbahaya.
 - c. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi.
 - d. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan pada sarana produksi dan dsitribusi.
 - e. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum.
 - f. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
 - g. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen.
 - h. Evaluasi dan penyusunan laporan pengaduan konsumen.
 - i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtangaan.
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Indikator Kinerja Utama :

No	Uraian	Sumber Data
1.	Persentase obat yang memenuhi syarat	Hasil pengawasan obat dan makanan di Provinsi Kalimantan Selatan
2.	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	
3.	Persentase Kosmetika yang memenuhi syarat	
4.	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	
5.	Persentase makanan yang memenuhi syarat	
6.	Tingkat Kepuasan Masyarakat	Survey Kepuasan Masyarakat

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Banjarmasin



Dra. Rustyawati, Apt. M.Kes.Epid.
NIP. 19660909 199303 2 002

LAMPIRAN 4. REALISASI CAPAIAN TRIWULAN BBPOM DI BANJARMASIN TAHUN 2017

Lampiran Perjanjian Kinerja - Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2017

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA BBPOM DI BANJARMASIN TAHUN 2017

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		Target 2017	TARGET				REALISASI				KET.
		URAIAN	SATUAN		B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9	B12	
1	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase obat yang memenuhi syarat	Persen	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	100	98,65	99,37	97,46	
		2. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	Persen	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	85,96	82,47	77,68	80,42	
		3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	Persen	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	90,77	96,59	93,02	94,43	
		4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	Persen	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	100	100	100	100	
		5. Persentase makanan yang memenuhi syarat	Persen	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	90,84	90	85,01	89,64	
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	1. Tingkat Kepuasan Masyarakat	Persen	83,00	0	0	0	83,00	0	0	0	83,23	
		2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	Kabupaten/ Kota	11	2	5	8	11	2	2	5	11	
3	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP dari BPOM		A (81)	-	-	-	A (81)	-	-	-	BB (72,26)	
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan													
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	1.a. Jumlah sampel Obat KB yang diuji menggunakan parameter kritis	Sampel	34	8	18	27	34	0	0	0	34	
		1.b. Jumlah sampel Obat yang diuji menggunakan parameter kritis	Sampel	1.926	443	1015	1534	1926	174	369	795	1927	
		1.c. Jumlah sampel Makanan yang diuji menggunakan parameter kritis	Sampel	840	193	443	669	840	132	402	603	840	
		2. Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	Persen	100	30,00	80,00	90,00	100	2,94	2,94	100	100	
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	Persen	5,80	2,00	3,50	5,00	5,80	1,68	2,74	4,06	6,2	

LAMPIRAN 4. REALISASI CAPAIAN TRIWULAN BBPOM DI BANJARMASIN TAHUN 2017

Lampiran Perjanjian Kinerja - Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2017

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA BBPOM DI BANJARMASIN TAHUN 2017

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		Target 2017	TARGET				REALISASI				KET.
		URAIAN	SATUAN		B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9	B12	
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standard	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	Persen	28,15	3,00	9,00	18,00	28,15	4,78	14,25	19,26	31,01	
4	Meningkatnya hasil tindaklanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan	Perkara	9	1	3	7	9	0	4	8	11	
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat													
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	1. Jumlah layanan publik BB/BPOM	Layanan	1.025	300	500	750	1025	301	589	963	1229	
		2. Jumlah komunitas yang diberdayakan	Desa	26	22	22	22	26	22	22	22	26	
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai BPOM													
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	Persen	70,00	62	62	62	70,00	62	62	62	69,3	
2	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Dokumen	10	5	7	9	10	5	7	7	10	

LAMPIRAN 5. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN KEGIATAN TAHUN 2017 BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN

NO	SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN (SUB KOMPONEN DIPA)	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%		
1	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	1.1. MENINGKATNYA KUALITAS SAMPLING DAN PENGUJIAN TERHADAP PRODUK OBAT DAN MAKANAN YANG BEREDAR	001 Sampel obat KB yang diuji dengan parameter kritis	Input : Dana	23.468.000	18.370.669	78,28		
				Output : Jumlah Sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	34	34	100,00		
			003 Sampel makanan yang diuji dengan parameter kritis	Input : Dana	510.768.000	494.861.385	96,89		
				Output : Jumlah Sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	840	840	100,00		
			012 Dokumen dukungan teknis dan manajemen laboratorium yang dilaksanakan	Input : Dana	2.129.689.000	2.099.787.291	98,60		
				Output : Jumlah dokumen	16	16	100,00		
			1.2. MENINGKATNYA KUALITAS SARANA PRODUKSI YANG MEMENUHI STANDAR	081 Sampel obat yang diuji dengan parameter kritis	Input : Dana	991.508.000	923.879.374	93,18	
				Output : Jumlah Sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	1933	1927	99,69		
				004 Cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	Input : Dana	101.087.000	95.359.983	94,33	
					Output : Jumlah sarana yang diperiksa	93	96	103,23	
				1.3. MENINGKATNYA KUALITAS SARANA DISTRIBUSI YANG MEMENUHI STANDAR	005 Cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan	Input : Dana	675.872.000	650.882.150	96,30
						Output : Jumlah sarana yang diperiksa	824	863	104,73

LAMPIRAN 5. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN KEGIATAN TAHUN 2017 BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN

NO	SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN (SUB KOMPONEN DIPA)	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
		1.4. MENINGKATNYA HASIL TINDAK LANJUT PENYIDIKAN TERHADAP PELANGGARAN OBAT DAN MAKANAN	002 Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan	Input : Dana	625.840.000	494.426.790	79,00
				Output : Jumlah Perkara	9	11	122,22
			011 Laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang obat dan makanan yang ditangani	Input : Dana	283.117.000	254.125.470	89,76
				Output : Jumlah Laporan	3	3	100,00
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	2.1. MENINGKATNYA KERJASAMA, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI	007 Layanan publik BB/BPOM	Input : Dana	1.082.971.000	995.448.400	91,92
				Output : Jumlah Layanan	1025	1229	119,90
			008 Komunitas yang diberdayakan	Input : Dana	1.319.976.000	1.270.175.285	96,23
				Output : Jumlah Komunitas	26	26	100,00
3	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan Badan POM	3.1. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA YANG TERKAIT PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	009 Sarana prasana sesuai standar	Input : Dana	499.001.000	457.226.731	91,63
				Output : Jumlah Paket	1	1	100,00
			013 Bangunan/gedung	Input : Dana	1.770.421.000	1.335.515.459	75,43
				Output : Luas Bangunan yang direncanakan (m ²)	150	150	100,00

LAMPIRAN 5. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN KEGIATAN TAHUN 2017 BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN

NO	SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN (SUB KOMPONEN DIPA)	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%	
			082 Alat laboratorium yang diadakan	Input : Dana	4.971.915.000	4.829.501.400	97,14	
				Output : Jumlah Alat Laboratorium yang diadakan (unit)	10	10	100,00	
			951 Layanan Internal (Overhead)	Input : Dana	124.588.000	124.570.980	99,99	
				Output : Jumlah paket pengadaan	1	1	100,00	
			3.2. PENYUSUNAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, KEUANGAN DAN EVALUASI YANG DILAPORKAN TEPAT WAKTU	010 Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Input : Dana	1.431.615.000	1.281.819.463	89,54
					Output : Jumlah dokumen	10	10	100,00
				994 Layanan Perkantoran	Input : Dana	7.545.988.000	7.227.151.102	95,77
					Output : Jumlah bulan layanan	12	12	100,00

LAMPIRAN 6. PENGUKURAN EFISIENSI KEGIATAN TAHUN 2017 BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN

NO	SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN (SUB KOMPONEN DIPA)	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET		IE	SE	KATEGORI	TE		
				INPUT	OUTPUT						
1	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	1.1. MENINGKATNYA KUALITAS SAMPLING DAN PENGUJIAN TERHADAP PRODUK OBAT DAN MAKANAN YANG BEREDAR	001 Sampel obat KB yang diuji dengan parameter kritis	78,28	100,00	1,28	1	Efisien	0,28		
			003 Sampel makanan yang diuji dengan parameter kritis	96,89	100,00	1,03	1	Efisien	0,03		
			012 Dokumen dukungan teknis dan manajemen laboratorium yang dilaksanakan	98,60	100,00	1,01	1	Efisien	0,01		
			081 Sampel obat yang diuji dengan parameter kritis	93,18	99,69	1,07	1	Efisien	0,07		
		1.2. MENINGKATNYA KUALITAS SARANA PRODUKSI YANG MEMENUHI STANDAR	004 Cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	94,33	103,23	1,09	1	Efisien	0,09		
		1.3. MENINGKATNYA KUALITAS SARANA DISTRIBUSI YANG MEMENUHI STANDAR	005 Cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan	96,30	104,73	1,09	1	Efisien	0,09		
		1.4. MENINGKATNYA HASIL TINDAK LANJUT PENYIDIKAN TERHADAP PELANGGARAN OBAT DAN MAKANAN	002 Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan	79,00	122,22	1,55	1	Efisien	0,55		
			011 Laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang obat dan makanan yang ditangani	89,76	100,00	1,11	1	Efisien	0,11		
		2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	2.1. MENINGKATNYA KERJASAMA, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI	007 Layanan publik BB/BPOM	91,92	119,90	1,30	1	Efisien	0,30
					008 Komunitas yang diberdayakan	96,23	100,00	1,04	1	Efisien	0,04

NO	SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN (SUB KOMPONEN DIPA)	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET		IE	SE	KATEGORI	TE
				INPUT	OUTPUT				
3	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan Badan POM	3.1. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA YANG TERKAIT PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	009 Sarana prasana sesuai standar	91,63	100,00	1,09	1	Efisien	0,09
			013 Bangunan/gedung	75,43	100,00	1,33	1	Efisien	0,33
			082 Alat laboratorium yang diadakan	97,14	100,00	1,03	1	Efisien	0,03
			951 Layanan Internal (Overhead)	99,99	100,00	1,00	1	Efisien.	0,00
		3.2. PENYUSUNAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, KEUANGAN DAN EVALUASI YANG DILAPORKAN TEPAT WAKTU	010 Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	89,54	100,00	1,12	1	Efisien	0,12
			994 Layanan Perkantoran	95,77	100,00	1,04	1	Efisien	0,04



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. Sapari, Apt., M.Kes.**

Jabatan : **Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P.**

Jabatan : **Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan**

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kepala Badan POM

Banjarmasin, 05 Januari 2018
Pihak Pertama
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Banjarmasin



Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P.
NIP. 19631109 199003 2 001

Drs. Sapari, Apt., M.Kes.
NIP. 19590815 199303 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BALAI BESAR POM di BANJARMASIN**

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,50
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	75,00
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	92,00
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	91,00
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78,00
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	84,00
		Jumlah Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	12
3	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP Balai Besar POM di Banjarmasin dari Badan POM	A

LAMPIRAN 7. PERJANJIAN KINERJA 2018



NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	1.967
		Sampel Makanan yang diuji dengan parameter kritis	840
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	5,8%
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standard	Cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian (Saryanfar)	28,27%
		Cakupan pemeriksaan sarana distribusi Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Makanan	25,43%
4	Meningkatnya hasil tindaklanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Perkara di bidang penyidikan Obat dan Makanan	9
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat			
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Layanan publik Balai Besar POM di Banjarmasin	1.300
		Komunitas yang diberdayakan	30
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan			
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Sarana dan prasarana sesuai standar	75%
2	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9

LAMPIRAN 7. PERJANJIAN KINERJA 2018



Kegiatan

Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar
POM di Banjarmasin

(Lima puluh dua milyar delapan ratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh
delapan ribu rupiah).

Anggaran

Rp. 52.813.578.000,-

Pihak Kedua
Kepala Badan POM

Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P.
NIP. 19631109 199003 2 001

Banjarmasin, 05 Januari 2018
Pihak Pertama
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Banjarmasin



Drs. Sapari, Apt., M.Kes.
NIP. 19590815 199303 1 001

LAMPIRAN 8. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA 2018

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TAR GET 2018	TARGET				REALISASI				KET.
		URAIAN	SATU AN		B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9	B12	
1	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase obat yang memenuhi syarat	Persen	93,50	93,50	93,50	93,50	93,50					
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	Persen	75,00	63,00	75,00	75,00	75,00					
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	Persen	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00					
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	Persen	91,00	82,00	91,00	91,00	91,00					
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	Persen	78,00	76,50	78,00	78,00	78,00					
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	Persen	84,00	-	-	-	84,00					
		Jumlah Propinsi dan Kabupaten/ Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	Kabupaten / Kota	12	2	5	8	12					
3	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP Balai Besar POM di Banjarmasin dari Badan POM		A	-	-	-	A					

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TAR GET 2018	TARGET				REALISASI				KET.
		URAIAN	SATU AN		B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9	B12	
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan													
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	Sampel	1.967	644	1475	2230	1.967					
		Sampel Makanan yang diuji dengan parameter kritis	Sampel	840	644	1475	2230	840					
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	Persen	5,8%	1,16%	3,48%	4,93%	5,8%					
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standard	Cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian (Saryanfar)	Persen	28,27%	5,65%	16,96%	24,03%	28,27%					
		Cakupan pemeriksaan sarana distribusi Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Makanan	Persen	25,43%	5,09%	15,26%	21,62%	25,43%					

LAMPIRAN 8. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA 2018

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2018	TARGET				REALISASI				KET.
		URAIAN	SATUAN		B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9	B12	
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Perkara di bidang Obat dan Makanan	Perkara	9	1	3	7	9					
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat													
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Layanan publik Balai Besar POM di Banjarmasin	Layanan	1.300	300	700	1.000	1.300					
		Komunitas yang diberdayakan	Desa	30	26	26	26	30					
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai BPOM													
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Sarana dan prasarana sesuai standar	Persen	75%	70%	70%	70%	75%					
2	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Dokumen	9	5	7	9	9					

AMPIRAN 8. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA 2018

Lampiran Perjanjian Kinerja - Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2018

Banjarmasin, 5 Januari 2018

Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin



[Handwritten signature]
Drs. Sapari, Apt., M.Kes.

NIP. 19590815 199303 1 001

Daftar Peralatan Laboratorium Tahun 2017

No	Nama Alat/instrument	Tahun Pengadaan	Total	Jumlah Standar Minimum Lab.	Gap
1	A A S	2013 dan 2017	2	1	-
2	Anaerobic Jar	2002 & 2005	4	4	-
3	Antibiotic Zone Reader	2008	1	1	-
4	Autoclave	1995, 2003, 2009, 2015	3	2	-
5	Aqua demineralisator	2007 & 2012	2	2	-
6	Automatic titrator/Karl-Fisher	2009	1	1	-
7	Bejana Kromatografi	2009, 2010, 2012, 2014	35	14	-
8	Centrifuge	1997, 2008, 2012, 2013, 2015	5	5	-
9	Colony Counter	1997	1	1	-
10	Conductivitymeter	2008, 2009, 2015	3	1	-
11	Dehumidifier	2012	4	6	2
12	Desiccator (besar)	1995, 2006	3	8	5
13	Desiccator (kecil)	1995, 2006	5	10	5
14	Autodesiccator	2012	4		0
15	Distillation app. (aquadest)	1997, 2004, 2012	3	4	1
16	Disintegration Tester	1986 & 2012	2	2	-
17	Dissolution Tester	1998, 2008, 2009	3	2	-
18	Fluorometer *	-	0	1	1
19	F T I R	-	0	1	1
20	Freezer (-20°C)	-	0	1	1
21	Funnel Shaker	2013	1	5	4
22	GC (det. ECD, FID, NPD)	2012 dan 2017	2	2	-
23	GC MS	-	0	1	1
24	Glass Filter Holder	2012	6	5	-
25	Gutzeit App.	2005	1	2	1
26	Heating Mantle	2000, 2001, 2012	3	7	4
27	HPLC	2007, 2008, 2010, 2012, 2016, 2017	10	7	-
28	Inkubator 20-25°C	2009	1	4	3
29	Inkubator 30°C	2007	1	1	-
30	Inkubator 35-37°C	1984, 2003, 2012	3	2	-
31	Inkubator 41-42°C	1993	1	1	-
32	Inkubator 43°C	-	1	1	-
33	Inkubator 44-44.5°C	2004	1	1	-
34	Inkubator 41,5±1 ⁰ C	1988	1		-
35	Inkubator 32,5 ± 2,5°C	2010	1		-
36	Laminar Air Flow (BSL*)	1984, 1995, 2008, 2012	4	3	-

No	Nama Alat/instrument	Tahun Pengadaan	Total	Jumlah Standar Minimum Lab.	Gap
37	Lampu UV λ 254 & 366 nm	1980, 2004	3	3	-
38	Lemari asam	2005, 2007, 2010, 2013, 2015	7	7	-
39	Lemari Pendingin	2000, 2001, 2004, 2009, 2011, 2012, 2014	14	9	-
40	Magnetic Stirrer + Hot Plate	1998, 2005, 2011, 2012	5	6	1
41	Magnetic Stirrer Bar	2005, 2007, 2011,	11	15	4
42	Microsyringe 5 μ l for GC	-	0	2	2
43	Microsyringe 10 μ l for GC		2	2	-
44	Microsyringe 25 μ l for TLC	-	7	25	18
45	Microsyringe 50 μ l for TLC	2009 2010, 2012, 2013	11	25	14
46	Microsyringe 100 μ l for TLC	2010, 2012	13	25	12
47	Microsyringe 100 μ l for HPLC	2011, 2012, 2013, 2014	5	25	20
48	Microwave Digestor	2011	1	1	-
49	Mikroskop Binokuler	2006	1	2	1
50	Muffle Furnace	2001, 2009, 2013	3	4	1
51	Nitrogen Analyzer (kjeldahl)	2008	1	2	1
52	O v e n	1980, 1983, 1993, 2005, 2009, 2012,2016	8	9	1
53	Oven Vakum	2012	1	3	2
54	Particle Counter *	2009	1	1	-
55	pH. Meter	2004.2016, 2017	7	6	-
56	Piknometer 10 ml	2014	1	4	3
57	Piknometer 25 ml	2005, 2007, 2011, 2012, 2013	12	4	-
58	Pipette Washer	2016	2	4	2
59	Polarimeter	2008	1	1	0
60	Refraktometer	2012	1	2	1
61	Rotary Evaporator	2013	1	2	1
62	Shaker (mendatar)	2013	1	7	6
63	Spektrofluorometer	-	0	1	1
64	Spekrodensitometer	2012	1	1	-
65	Spektrofotometer UV-Vis	1998, 2007, 2008, 2017	4	4	-
66	Spektrofotometer Vis	-	0	1	1
67	Stomacher	2007, 2017	2	1	-
68	Thermohyrometer	1998, 2011, 2012, 2015	25	11	-
69	Thermometer (-30) - 50°C	-	0	5	5

No	Nama Alat/instrument	Tahun Pengadaan	Total	Jumlah Standar Minimum Lab.	Gap
70	Thermometer 0 - 100°C	2007	1	5	4
71	Thermometer 0 - 200°C	2008	2	2	-
72	Timbangan Mikro + meja	2009, 2013	2	2	-
73	Timbangan Semi-mikro	1998, 2012	2	5	3
74	Timbangan Analitik	1998, 2003, 2006, 2007, 2009, 2013, 2016	10	8	-
75	Timbangan Top loading	1981, 2005, 2009, 2010, 2012, 2016	6	7	1
76	Turbidimeter	-	0	1	1
77	Ultrasonic Cleaner (vol > 6 l)	2007, 2010	2	6	4
78	UPS (kapasitas > 10 KVA)	1998, 2008, 2013, 2017	4	6	2
79	Vortex mixer	1997, 2008, 2012, 2013	6	4	-
80	Waterbath	2012, 2013	2	8	6
81	Waterbath Shaker	2009, 2016	2	1	-
82	Orbital Shaker	2016	1		-
83	Incubator	2015, 2016	4		-
84	Deep Freezer	2016	1		-
85	Homogin Mixer	2016	1		-
86	Densitometer For Protein	2016	1		-
87	Analytical Balance	2016	3		-
88	Micro Analytical Balance	2016	1		-
89	Mesin Penutup Vial	2016	1		-
90	Liminar Flow Cabinet	2016	1		-
91	Hotplate Stirer	2016	3		-
92	Karl Fisher Water Tritator	2016	1		-
93	Fume Hood	2016	1		-
94	Uninterrupted Power Supply	2016	1		-
95	Mortar Crusher Grinder	2016	1		-
96	Microwave Heater	2016	1		-
97	Pump for HPLC and Accessories	2015	1		-
98	Pipette Filter	2015	3		-
99	Vacuum Manifold	2015	1		-
100	U.V Lamp	2015	1		-
101	Pengukur Dissolution	2015	1		-
102	Shaking Waterbath	2015	1		-
103	Tachometer	2015	1		-
104	Hot Plate Stirer	2015	1		-
105	Pressure Vessel	2015	1		-
106	Laboratory Refrigerator	2015	1		-

No	Nama Alat/instrument	Tahun Pengadaan	Total	Jumlah Standar Minimum Lab.	Gap
107	Automatic Pipet Dispenser	2015	3		-
108	Detector HPLC	2015	1		-
109	Thermocouple	2015	3		-
110	Ultrasonic Cleaner	2015	1		-





BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri NO. 40 Banjarmasin

Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com

Telp. 0511 3305115

Fax. 0511 3301671

